



**H. Marten Taha, SE., M.Ec.Dev**  
Walikota Gorontalo



**Ryan F. Kono, B.Com**  
Wakil Walikota Gorontalo



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## TAHUN 2021

**SMART CITY**  
KOTA GORONTALO





# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1. LATAR BELAKANG

Tata Pemerintahan yang baik adalah merupakan salah satu prasyarat dalam suatu pemerintahan daerah guna mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna serta bertanggungjawab, dimana untuk mewujudkan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, legitimate dan jelas.

Salah satu asas umum dalam penyelenggaraan Negara adalah asas Akuntabilitas, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LKIP adalah merupakan Laporan Kinerja tahunan Pemerintah yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kinerja. Ikhtisar pencapaian sasaran menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## **2. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024;

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **3.1. Maksud**

- 1) Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dan akuntabel;
- 2) Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2020 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;

**3.2. Tujuan**

- 1) Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Gorontalo selama Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun ketiga RPJMD periode 2019-2024;
- 2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Gorontalo ditahun 2020 dan bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Gorontalo dengan menerapkan asan transparansi, sistematis dan akuntabel;

**Tabel 1.1 Visi, Misi dan Sasaran**

<b>VISI : KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK</b>			
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
<b>Misi 1 : Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas</b>			
T1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya	S1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
		S2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.
		S3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat
<b>Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector public</b>			
T2	Meningkatnya fungsi layanan Kawasan Perkotaan dan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan.	S1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman.
		S2	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan
<b>Misi 3 : Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian</b>			
T3	Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran	S1	Meningkatnya daya beli masyarakat;
		S2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
		S3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
<b>Misi 4 : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola,</b>			



VISI : KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK			
Tujuan		Sasaran	
<b>kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur</b>			
T4	Terwujudnya birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel	S1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan
		S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan
		S3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan
<b>Misi 5 : Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya</b>			
T5	Terwujudnya Kota Gorontalo sebagai kota yang aman, tentram, damai dan berbudaya yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa	S1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		S2	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya
<b>Misi 6 : Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini</b>			
T6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	S1	Meningkatnya Nilai Investasi

#### 4. GAMBARAN UMUM KOTA GORONTALO

##### 4.1. LETAK WILAYAH GEOGRAFIS

Kota Gorontalo terletak di Provinsi Gorontalo, terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dengan luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo adalah 79,59 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 50 kelurahan.

**Tabel 1.2**  
**Luas Kota Gorontalo Menurut Kecamatan Tahun 2021**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas ( km <sup>2</sup> )
Kota Barat	Buladu	20,22
Dungingi	Huangobotu	4,70
Kota Selatan	Biawu	2,83
Kota timur	Moodu	5,36
Hulonthalangi	Tenda	14,33





Dumbo Raya	Talumolo	14,14
Kota utara	Dulomo Selatan	8,08
Kota Tengah	Pulubala	4,84
Sipatana	Molosipat U	5,09
<b>Luas Kota Gorontalo</b>		<b>79,59 km<sup>2</sup></b>

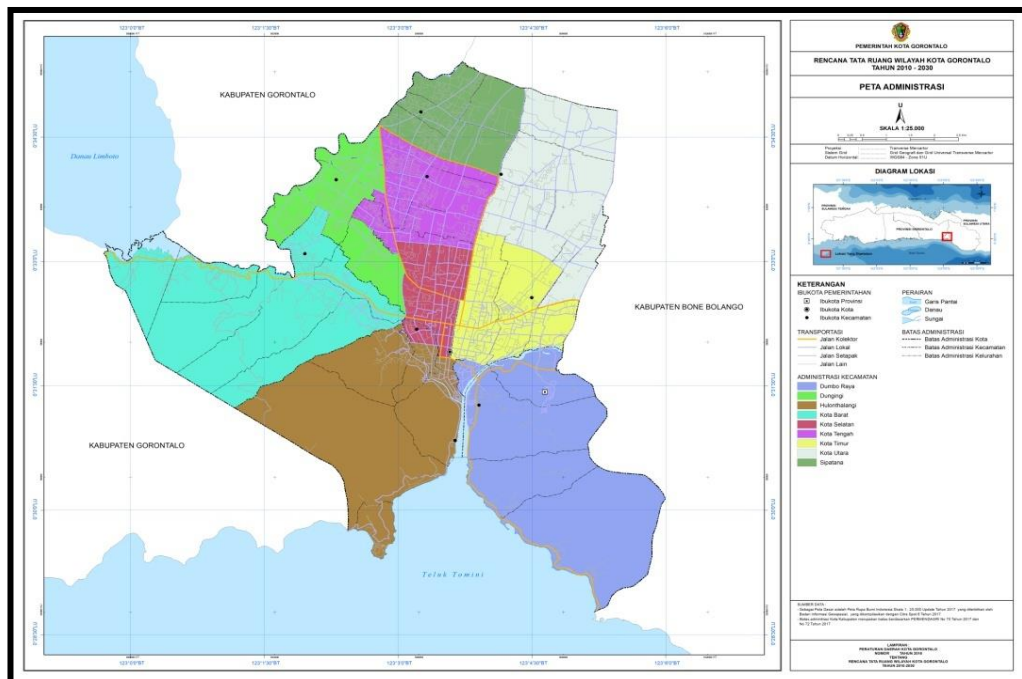
Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak antara 00°28'17" - 00°35'56" Lintang Utara dan 122°59'44"-123°05'59" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas administratif Kota Gorontalo sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Timur dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebelah Barat dengan Kecamatan Telaga, Kecamatan Batudaa, dan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sedangkan sebelah Selatan dengan Teluk Tomini.

<b>Tabel 1.3</b>			
<b>Daftar Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Gorontalo</b>			
<b>I</b>	<b>Kecamatan Kota Barat</b>	<b>VI</b>	<b>Kecamatan Kota Utara</b>
1	Buladu*	30	Dembe II
2	Buliide	31	Dembe Jaya
3	Dembe I	32	Dulomo
4	Lekobalo	33	Dulomo Selatan*
5	Molosipat W	34	Wongkaditi
6	Pilolodaa	35	Wongkaditi Barat
7	Tenilo		
<b>II</b>	<b>Kecamatan Kota Selatan</b>	<b>VII</b>	<b>Kecamatan Hulontalo</b>
8	Biawao	36	Donggala
9	Biawu*	37	Pohe
10	Limba B	38	Siendeng
11	Limba U I	39	Tanjung Keramat
12	Limba U II	40	Tenda*
<b>III</b>	<b>Kecamatan Kota Timur</b>	<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Sipatana</b>
13	Bugis	41	Bulutadaa Barat



Tabel 1.3 Daftar Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Gorontalo			
14	Ipilo	42	Bulutadaa Timur
15	Moodu*	43	Molosipat U*
16	Heledulaa Utara	44	Tanggikiki
17	Heledulaa Selatan	45	Tapa
18	Padebuolo		
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Duingingi</b>	<b>IX</b>	<b>Kecamatan Dumbo Raya</b>
19	Huangobotu*	46	Botu
20	Libuo	47	Talumolo*
21	Tomulabutao	48	Leato Selatan
22	Tomulabutao Timur	49	Leato Utara
23	Tuladenggi	50	Tamalate
<b>V</b>	<b>Kecamatan Kota Tengah</b>		
24	Dulalowo		
25	Dulalowo Timur		
26	Liluwo		
27	Paguyaman		
28	Pulubala		
29	Wumialo		

**GAMBAR 1.1 PETA KOTA GORONTALO**



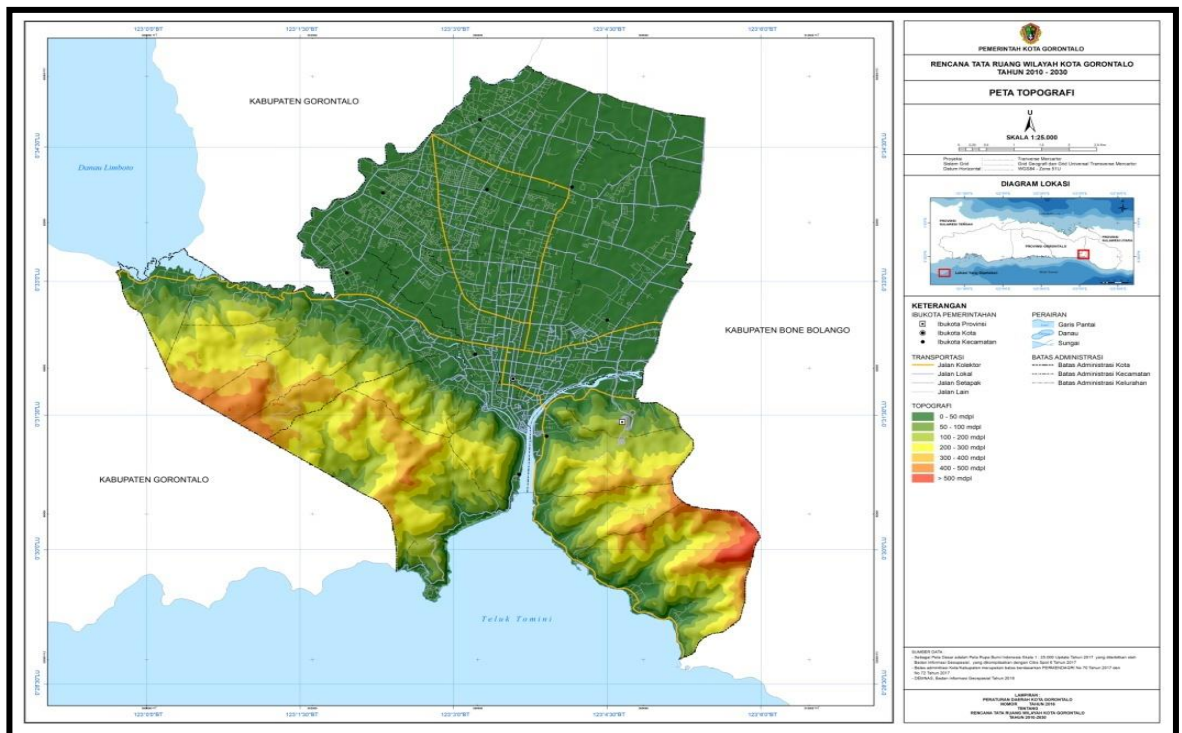
Sumber: RTRW Kota Gorontalo 2010 - 2039

#### 4.2. TOPOGRAFI

Topografi Kota Gorontalo umumnya berupa dataran rendah. Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kota Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 8% (datar), tersebar diseluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Kota Utara. Sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 8 – 15% (landai), 15 – 25% (bergelombang/ berbukit), 25 – 40% (berbukit), >40% tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumbo Raya, Hulonthalangi dan Kota Barat.

Topografi Kota Gorontalo meliputi daerah perbukitan sampai bergunung dibagian selatan dan pendataran (pantai) dibagian selatan yang berbatasan dengan Teluk Tomini. Pada bagian utara merupakan daerah perkotaan. Topografi Kota Gorontalo yang datar antara 0-8%, di kecamatan Kota Utara.

Gambar 1.2  
Peta Topografi Kota Gorontalo



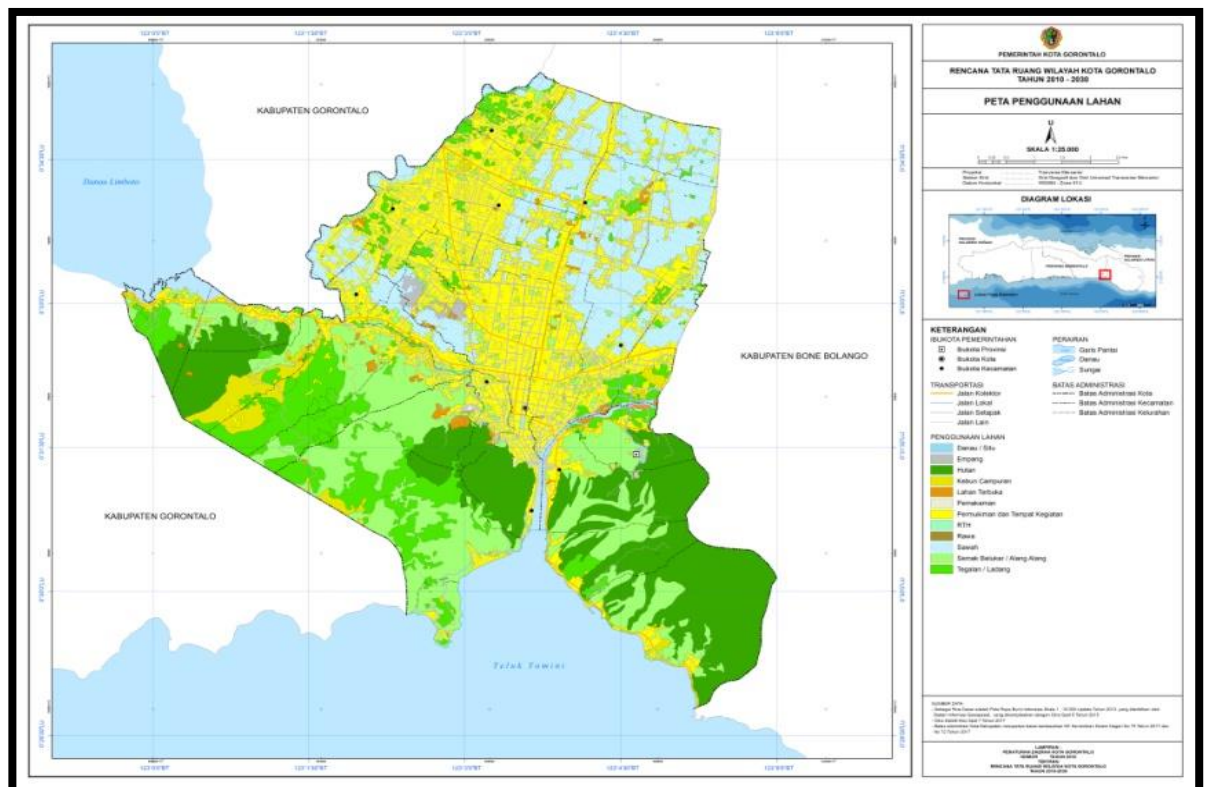
Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2039



### 4.3. PENGGUNAAN LAHAN

Kewenangan dan tanggung jawab penatagunaan lahan di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai arahan pola ruang wilayah yang direncanakan pengembangannya sesuai dalam dokumen RTRW Kota Gorontalo. Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kota Gorontalo terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Lahan basah terdiri dari danau/situ dengan luasan 24263,55 hektar, empang seluas 314365,55 hektar, Hutan 13048686,07 hektar, Rawa 352967,36 hektar, Semak belukar/alang-alang 13967810,67 hektar, dan sungai dengan luasan 708958,48 hektar. Lahan kering terdiri dari Lahan terbuka dengan luasan 618863,63 hektar, Kebun campuran seluas 1742261,41 hektar, jembatan 1341,45 hektar, Pemakaman 180736,41 hektar, permukiman dan tempat kegiatan seluas 20804223,99 hektar serta tegalan/ladang dengan luasan 8115326,93 hektar.

**Gambar 1.3**  
**Peta Penggunaan Lahan Kota Gorontalo**



Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2039



#### 4.4. PENDUDUK

Jumlah Penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2021 adalah 201.728 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.515 orang/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dimana masing-masing jumlahnya adalah 100.415 jiwa penduduk laki-laki dan 101.313 jiwa penduduk perempuan. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Gorontalo tahun 2018-2020.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Tahun**  
**2019 – 2021 Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2019	2020	2021
1	Kota Barat	23.968	24.260	24.442
2	Dungingi	25.445	20.722	26.277
3	Kota Selatan	20.789	20.316	20.639
4	Kota Timur	27.281	26.107	26.897
5	Hulonthalangi	16.885	27.093	16.853
6	Dumbo Raya	19.242	27.363	27.174
7	Kota Utara	19.786	19.519	27.318
8	Kota Tengah	27.356	19.232	19.318
9	Sipatana	19.431	16.825	19.681
	<b>Jumlah</b>	<b>200.183</b>	<b>201.487</b>	<b>201.728</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Tahun 2021

Pada tahun 2021, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang, yaitu jumlah laki-laki adalah 200.183 jiwa dan perempuan 201.487 jiwa, angka perbandingan ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :



**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Menurut Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	2021
1	Kota Barat	12.248	24.260	24.442
2	Dungingi	13.045	13.182	26.277
3	Kota Selatan	10.178	10.461	20.639
4	Kota Timur	13.345	13.552	26.897
5	Hulonthalangi	8.406	8.447	16,853
6	Dumbo Raya	9.643	9.531	27.174
7	Kota Utara	10.285	10.212	27.318
8	Kota Tengah	13.468	13.850	19.318
9	Sipatana	9.797	9.884	19.681
	<b>Jumlah</b>	<b>200.183</b>	<b>201.487</b>	<b>201.728</b>

#### 4.5. PDRB

PDRB adalah gambaran kegiatan roda perekonomian yang dilakukan masyarakat suatu daerah yang pada akhirnya menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan kondisi ekonomi serta tingkat kesejahteraan rakyatnya. Ditinjau atas dasar Harga Berlaku, PDRB Kota Gorontalo secara nominal 3(tiga) Tahun terakhir ini mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, tahun 2018 Rp. 7.748.239,2 tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 8.453.185,8, dan pada tahun 2020 mencapai Rp. 8.537.339,4. Sedangkan ditinjau Atas Dasar Harga Konstan sejak tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 5772119,0. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 6.173.365,6, hingga tahun 2020 mencapai Rp. 6.171.915,3. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Gorontalo Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 1.6**  
**Nilai dan Kontribusi PDRB Tahun 2019-2021**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gorontalo (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	Daftar Harga		
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	5	7	9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	412,390.0	408,794.0	435,80
B	Pertambangan dan Penggalian	29,086.3	29,447.7	30,45
C	Industri Pengolahan	422,926.1	429,719.3	460,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,239.8	4,658.7	4,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,509.9	17,878.4	18,35
F	Konstruksi	1,110,248.0	1,075,354.8	1,126,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,421,161.4	1,359,348.7	1,436,18
H	Transportasi dan Pergudangan	767,872.8	758,582.3	786,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	444,694.0	431,078.6	452,89
J	Informasi dan Komunikasi	487,900.1	503,491.7	519,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	751,898.7	869,940.5	1,002,53
L	Real Estate	362,027.9	364,513.5	353,95
M,N	Jasa Perusahaan	14,438.2	13,605.0	13,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910,289.6	918,612.8	924,41
P	Jasa Pendidikan	704,973.6	754,769.2	784,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	409,679.7	424,857.4	456,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	181,849.7	172,686.7	178,47
<b>PDRB</b>		<b>8,453,185.8</b>	<b>8,537,339.4</b>	<b>8,958,86</b>

Jika ditinjau dari nilai dan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku, maka dari tabel di atas terlihat bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor mendominasi selama 3 (tiga) Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.436.18. Kontribusi kedua tertinggi diberikan oleh sektor konstruksi selama tiga Tahun hingga Tahun 2021 sebesar Rp. 1.126,14. Kontribusi ketiga terbesar adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selama tiga Tahun hingga Tahun 2021 Rp. 924,41. Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh ketiga sektor diatas karena sejalan dengan perkembangan Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan dan pusat



perdagangan di wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh sektor pengadaan listrik dan gas yang mempunyai peranan yang kecil terhadap perekonomian Kota Gorontalo dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.7

**Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2021**

Kategori	Uraian	Daftar Harga		
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	2	5	7	9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	296,002.2	286,572.6	292,27
B	Pertambangan dan Penggalian	22,143.1	22,000.3	22,46
C	Industri Pengolahan	287,441.2	288,188.4	302,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,868.4	5,421.1	5,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,879.8	12,052.1	11,98
F	Konstruksi	824,078.0	795,344.2	806,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	977,921.1	923,535.6	955,65
H	Transportasi dan Pergudangan	586,827.5	559,670.9	564,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	315,744.6	304,831.4	318,40
J	Informasi dan Komunikasi	387,073.5	415,154.2	428,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	522,612.8	599,256.9	655,34
L	Real Estate	265,419.5	266,918.0	257,30
M,N	Jasa Perusahaan	10,034.7	9,349.9	9,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	712,032.8	711,961.3	711,73
P	Jasa Pendidikan	497,233.6	522,217.8	534,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305,974.0	311,679.3	327,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	146,078.7	137,761.2	140,86
<b>PDRB</b>		<b>296,002.2</b>	<b>286,572.6</b>	<b>292,27</b>



#### 4.6. PERTUMBUHAN EKONOMI

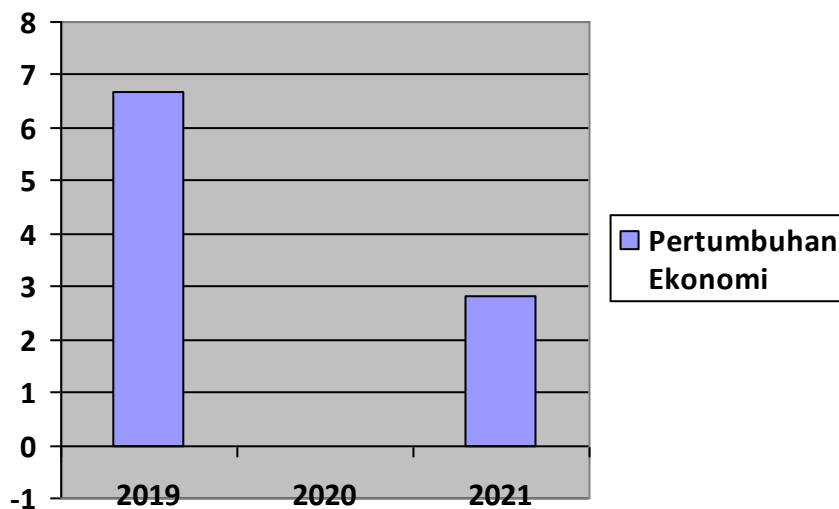
Pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo selama tiga tahun terakhir mengalami kontraksi dari tahun 2019 – 2021. Pada tahun 2020 seluruh dunia termasuk Kota Gorontalo mengalami wabah pandemic covid-19, sehingga menyebabkan kontraksi ekonomi di kuartal ke 2 dengan berlakunya kebijakan pemerintah secara nasional untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat pada aktivitas pertumbuhan ekonomi terbatas.

Aktivitas ekonomi secara umum tidak bergerak pada bulan April dan Mei 2020, disisi lain konsumsi yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tidak mampu tumbuh positif di kuartal 2 tahun 2020. Tiga penopang ekonomi di Kota Gorontalo yaitu pertanian, perdagangan dan jasa, merupakan sektor yang sangat terdampak akibat pandemic covid-19.

Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tiga tahun terakhir:

**Grafik 1.1**

#### **Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2021**



Sumber Data: BPS Kota Gorontalo Tahun 2020



#### 4.7. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gorontalo telah diatur dalam Perda nomor 5 Tahun 2016. Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel 1.8**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo**

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	OPD/BAGIAN	DASAR HUKUM
1	Sekretariat Daerah	9	1 Bagian Administrasi Pemerintahan umum	Perda No. 5 Tahun 2016 (Parwako No. 45 Tahun 2019)
			2 Bagian Administrasi Kesra	
			3 Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan	
			4 Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	
			5 Bagian Administrasi Pembangunan	
			6 Bagian Pengadaan Barang & Jasa	
			7 Bagian Umum	
			8 Bagian Hukum	
			9 Bagian Organisasi	
2	Sekretariat Dewan		Setwan	Perda Nomor 5 Tahun 2016
3	Dinas	18	1 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Perda Nomor 5 Tahun 2016
			2 Dinas Pendidikan	
			3 Dinas Kesehatan	
			4 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			5 Dinas PU dan Penataan Ruang	
			6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
			7 Dinas Perhubungan	
			8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
			9 dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	
			10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			11 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
			12 Dinas Lingkungan Hidup	
			13 Dinas Pengendalian Penduduk,	



NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	OPD/BAGIAN	DASAR HUKUM
			Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 Dinas Pangan 15 Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan UKM 16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 17 Satuan Polisi Pamong Praja 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
4	Badan	3	1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2 Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah 3 Badan Keuangan	Perda nomor 5 Tahun 2016
5	Lembaga Tekhnis Lainnya	3	1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Kesbang 3 Inspektorat	Perda Nomor 5 Tahun 2016
6	Kecamatan	9	1 Kecamatan Kota Selatan 2 Kecamatan Kota Utara 3 Kecamatan Kota Barat 4 Kecamatan Kota Timur 5 Kecamatan Duingi 6 Kecamatan Kota Tengah 7 Kecamatan Hulonthalangi 8 Kecamatan Dumbo Raya 9 Kecamatan Sipatana	Perda Nomor 5 Tahun 2016

Sumber Data :Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo



#### 4.8. PERSONIL/PEGAWAI

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pemerintah Kota Gorontalo membentuk 35 OPD dengan jumlah ASN sebanyak 4.014.

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2021**

Pangkat Golongan PNS		Laki-laki	Perempuan
Golongan I	I/A	-	-
	I/B	4	1
	I/C	1	-
	I/D	13	2
Golongan II	II/A	17	11
	II/B	51	43
	II/C	91	93
	II/D	120	127
Golongan III	III/A	136	209
	III/B	150	311
	III/C	151	432
	III/D	261	625
Golongan IV	IV/A	120	351
	IV/B	138	417
	IV/C	40	65
	IV/D	4	6
	IV/E	4	3
Golongan IX (PPPK)	IX	5	12
TOTAL		1306	2708

Sumber : BKPP Kota Gorontalo Dalam Angka 2021



**Tabel 1.10**  
**Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Esselon Tahun 2021**

PENDIDIKAN AKHIR	ESSELON													
	2019					2020					2021			
	II	III	IV	V	JML	II	III	IV	V	JML	II	III	IV	JML
SMA		1	114	5	120		1	89	5	95			73	73
D-I		1	1		2		1	1		2		1	2	3
D-II		1	1	1	3		1	3	1	5		1	1	2
D-III		3	23		26		3	23		26		3	29	32
D-IV		5	19		24		5	16		21		7	13	20
S-I	9	54	421	8	492	9	51	407	7	474	7	65	469	541
S-II	16	56	65		137	13	50	73		136	9	54	67	130
S-III	3				3	3				3	3		1	4
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>121</b>	<b>644</b>	<b>14</b>	<b>807</b>	<b>25</b>	<b>112</b>	<b>612</b>	<b>13</b>	<b>762</b>	<b>19</b>	<b>131</b>	<b>655</b>	<b>805</b>

Sumber : BKPP Kota Gorontalo 2021

#### 4.9. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Perhitungan IPM didasarkan pada rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kota Gorontalo yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2019 -2021 yaitu masing-masing sebesar 77,08 (2019); 77,13 (2020) dan 77,41 (2021) . Ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil.



Grafik 1.2 Perbandingan IPM Kota Gorontalo



Sumber Data : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

## 5. ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Identifikasi permasalahan dan Isu Strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang terkait sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat 5 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Gorontalo tahun 2019-2024. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Gorontalo 2019-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

### 5.1. Penguatan Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem pendidikan yang Tangguh dan berdaya saing dimasa depan memiliki peran dan kontribusi penting yang akan menentukan kualitas SDM sebagai penggerak utama dalam pembangunan didaerah. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki unggulan komparatif dan unggulan kompetitif serta latar belakang pendidikan dan keahlian yang memenuhi kebutuhan zaman diharapkan akan mampu memenangkan persaingan dipasar tenaga kerja baik regional maupun nasional. Modal dasar bagi terbentuknya unggulan komparatif dan unggulan kompetitif ialah dimilikinya



konsep diri dan kesadaran diri yang dalam pada proses belajar. Konsekuensi terhadap proses pembelajaran menuntut agar semua institusi pendidikan di Kota Gorontalo mampu memberikan kontribusi akan kemampuan tentang bagaimana belajar untuk belajar, bukan belajar untuk menghafal dan belajar untuk tergantung kepada pihak lain. Memasuki era global yang ditandai menguatnya ekonomi neoliberal, keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penentu dalam mendorong percepatan kemajuan suatu daerah bahkan suatu negara. Dinamika perkembangan ekonomi yang digerakkan ilmu pengetahuan itu secara teknis disebut *knowledge-driven economic growth*. Konsep ini menempatkan institusi pendidikan pada posisi amat penting dan strategis sebab dapat (1) melahirkan tenaga-tenaga kerja terlatih, kompetitif, dan adaptif seperti profesional, pakar, teknisi, dan manajer; (2) melahirkan ilmu pengetahuan baru dan menciptakan inovasi teknologi; dan (3) meningkatkan kemampuan mengakses perkembangan ilmu pengetahuan pada level global dan mengadaptasinya menurut konteks lokal (Bank Dunia, 2002). Karena itu, agar dunia pendidikan mampu melahirkan SDM yang tangguh, berkarakter dan bermartabat, maka kebijakan pendidikan harus diarahkan pada penekanan akan pentingnya anak bangsa untuk **menjadi insan cerdas komprehensif dan kompetitif**. Yakni, dimilikinya kecerdasan spiritual (*Olah Hati*), kecerdasan emosional & sosial (*Olah Rasa*), kecerdasan intelektual (*Olah Piki*), dan kecerdasan kinestetis (*Olah Raga*). Ditambah lagi dengan memiliki kemampuan Kompetitif.

## **5.2. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Dan Penataan Lingkungan.**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah sekaligus sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, infrastruktur yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan prasyarat yang mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur juga diikuti oleh penataan lingkungan hidup yang bertujuan yaitu :



1. Agar tercipta pengelolaan lingkungan secara terencana, rasional, dan optimal sesuai dengan daya dukungnya.
2. Agar terwujud keseimbangan tata guna lahan dengan daya dukung lingkungan.
3. Agar tercipta kelestarian mutu lingkungan dan kesejahteraan makhluk hidup.

### **5.3. Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Yang Terintegrasi**

Kompleksitas yang tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan oleh banyaknya elemen yang terkait, yang penanggannya harus dilakukan melalui lintas sektor, lintas wilayah, dan adanya keterlibatan berbagai pihak. Sehingga penanggulangan kemiskinan melalui strategi penurunan kemiskinan secara terpadu adalah sebuah keniscayaan. Secara etimologis, kata terpadu meliputi upaya penanganan permasalahan secara integral, serasi, terstruktur, harmonis dan selaras. Strategi penurunan kemiskinan terpadu di Kota Gorontalo diartikan sebagai upaya penanganan kemiskinan haruslah terintegrasi, serasi, terstruktur, harmonis dan selaras meliputi berbagai pendekatan, fokus, terencana, holistik dan berkelanjutan serta adanya inovasi baru. Permasalahan terkait dengan penurunan kemiskinan adalah sebagai berikut: masih banyaknya data rumah tangga miskin, program dan kegiatan yang tidak fokus, kurangnya sinergi dalam perencanaan dan implementasi program/kegiatan, eksekusi program yang terlambat, pendampingan program yang belum optimal, perlunya pengembangan struktur perekonomian daerah, dan permasalahan Kapasiats Kelembagaan Pronangkis.

### **5.4. Optimalisasi Layanan Kesehatan Yang Profesional**

Pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduk di Kota Gorontalo secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan serta aksesibilitas. Layanan kesehatan yang profesional membutuhkan tenaga kesehatan yang profesional dalam tugas dan melayani dengan hati yang dikenal dengan sebutan *The Five Stars Doctor*. Dalam konsep tersebut, dokter maupun tenaga kesehatan lainnya diharapkan mampu memiliki 5 peran, yaitu: (1)



Penyedia Pelayanan Kesehatan (*Care provider*) yang bertanggung jawab bagi kebutuhan fisik, sosial, dan mental dari pasien. Memastikan bahwa pasien menerima layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara integratif dan sesuai standar tertinggi yang dimiliki; (2) Pengambil Keputusan (*Decision-maker*) yang mampu memberikan keputusan terbaik dengan efikasi pengobatan dan biaya yang dibutuhkan; (3) Komunikator yang baik (*Communicator*) yang mampu berkomunikasi dengan pasien, keluarga dan lingkungan sekitar, memberikan persuasi dan edukasi demi peningkatan kesehatan pasien; (4) Pemimpin Masyarakat (*Community Leader*) yang berperan sebagai pemimpin masyarakat serta memberikan masukan dan arahan terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan (5) Pengelola Manajemen (*Manager*) yang memiliki kapasitas manajemen yang memadai dalam menyediakan layanan kesehatan bermutu. Selain itu, ketersediaan infrastruktur kesehatan yang handal serta aksesibilitas juga merupakan mutlak untuk mencapai layanan kesehatan yang professional.

#### **5.5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Dalam Menghadapi Era Industry 4.0**

Industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber-fisik, *internet of things (IoT)*, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya, revolusi 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan dengan segala konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun ada pula risiko yang mungkin muncul, misalnya berkurangnya Sumber Daya Manusia karena digantikan oleh mesin atau robot. Untuk itu, pemerintah daerah harus berusaha untuk terus-menerus meningkatkan system Pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0, sehingga daerah akan mempunyai daya saing SDM yang lebih kuat. Harus tercipta kesadaran bersama baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, bahwa



perubahan besar dalam industri 4.0 adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dengan segala potensi yang ada, pemerintah daerah harus menjadi pelaku aktif yang mendapat manfaat atas perubahan besar itu.

## 6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 terdiri atas 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Kata Pengantar
- 2) Ikhtisar Eksekutif
- 3) **Bab I Pendahuluan**

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum daerah Kota Gorontalo, dengan penekanan kepada aspek strategis daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi daerah.

- 4) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

- 5) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- iii. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- iv. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- v. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan





- vi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- vii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- viii. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

#### **6) Bab IV Penutup**

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

- 1) Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Gorontalo 2021
- 2) Rencana Kinerja Tahun 2021
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2021
- 4) Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021
- 5) Pengukuran Kinerja dan Capaian terhadap Akhir RPJMD Tahun 2021



## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. Penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Gorontalo 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Gorontalo merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Adapun terkait Indikator Kinerja Utama Kota Gorontalo sesuai dengan cascading RPJMD IKU Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian	
1	2		3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.37	10,37	100.00%
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.35	14,50	101.05%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 1</b>					<b>100,05%</b>
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,95	72,53	100.81%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 2</b>					<b>100.81%</b>
3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	3.1	PDRB Perkapita	Rp.	43,391.01	38,160.980	87,95%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 3</b>					<b>87.95 %</b>
4	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	4.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	65,46	66,21	101,15%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 4</b>					<b>101,15%</b>
5	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	5.1	Nilai Skor Adipura	Nilai	77,80	n/a	-
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 5</b>					<b>-</b>



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
6	Meningkatnya daya beli masyarakat;	6.1 Pengeluaran Per Kapita	Rp.	12,378,000	1.611.082	13,02%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 6</b>						<b>13,02%</b>
7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;	7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,00%	63.97%	99.95%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 7</b>						<b>99,95%</b>
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	8.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koperasi dan usaha mikro	Persen	66%	56%	84.85%
9	Meningkatnya peran pemuda	9.1 Persentase UMKM yang meningkat omsetnya	Persen	85%	90%	105,88%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 9</b>						<b>95.36%</b>
10	Meningkatnya kunjungan wisata	10.1 Persentase Kunjungan wisata	Persen	55%	55%	100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 10</b>						<b>100,00%</b>
11	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	11.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,5	89,20	101.94%
		11.2 Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,00	50,71	78.00%
		11.3 Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian	
1	2		3	4	5	6	
		11.4	Nilai LPPD	Nilai	3,4252	n/a	-
		11.5	Nilai AKIP	Nilai	BB ( 75,00 )	B (65,98)	87.97%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 11</b>						<b>98,05%</b>	
12	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12.1	Rasio polisi pamong praja per sepuluh ribu penduduk	/10000 penduduk	3.46	n/a	-
		12.2	Rasio Petugas Linmas yang diberdayakan	Rasio/Jml RT	25	25	100,00%
		12.3	Persentase pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	70	70	100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 12</b>						<b>100,00%</b>	
13	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya	13.1	Jumlah penyelenggaraan ivent seni budaya dan keagamaan yang di fasilitasi pemerintah	Jml	2	4	200,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 13</b>						<b>200,00%</b>	
14	Meningkatnya Nilai Investasi	14.1	Nilai Investasi	Rp	352.000.000,000	Rp 45,910,106,164	13,02%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 14</b>						<b>13,02%</b>	
<b>Capain Rata-Rata Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo</b>						<b>93.71%</b>	

Sumber Data : Bagian Organisasi (Di Olah) Tahun 2021





## A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 telah ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2021 sebagaimana lampiran I dan telah dilakukan perubahan pada tanggal sehubungan adanya perubahan anggaran. Adapun perubahan anggaran Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Kota Gorontalo tahun 2021 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber yang terbatas. Perjanjian Kinerja Kota Gorontalo Tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Februari 2021 mengalami perubahan pada bulan Agustus 2021 seiring terjadinya perubahan RKPD dan APBD 2021.

Perjanjian Kinerja Kota Gorontalo Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Gorontalo Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PERUBAHAN 2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.37
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.35
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,95
3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	PDRB Per kapita	Rp	43.395.010
4	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	65,46
5	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	Nilai skor Adipura	Nilai	77,8
6	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.	12.378.000





7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	64%
8	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi aktif dan sehat	Persen	85%
9	Meningkatnya Peran Muda	Persentase Pemuda yang berwirausaha diberbagai sektor	Persen	5
10	Meningkatkan Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Jml	55,325
11	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang patuh terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintah (tidak mendapat temuan hasil pengawasan yang bernilai materii)	%	89%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,5
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	3,4252
		Nilai LAKIP	Nilai	BB
10	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Rasio Polisi Pamong Praja	Per 1000 Penduduk	6,16
		Rasio Linmas yang diberdayakan	/jmlIRT	25,71
		Persentase Penurunan gangguan trantibum	NA	0,143
11	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya		2.250
		Jumlah Hafidz Qur'an Jus 30	NA	2.000
		Persentase Kegiatan Keagamaan dan Adat Budaya yang di Lestarikan	%	85
12	Memiliki Nilai Investasi	Nilai investasi (miliar rupiah)	Miliar Rp.	352.500.000

Sumber Data : Bagian Organisasi (diolah) Tahun 2021

**B. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2021**

Program dan anggaran untuk mendukung capaian sasaran Kota Gorontalo tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program dan Anggaran Kota Gorontalo Tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	683.813.523.157	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	79.744.521.626	DIKNAS
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	170.636.289.457	DIKES, RS.AS, RS.OTANAHA
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	780.085.405	PUPR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.431.686	PERKIM
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.693.250.000	SATPOL PP
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.180.086.185	DINSOS
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	672.313.675	DP2KBP3A
9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	57.135.952	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	530.195.181	DKPS
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	44.935.237	DP2KBP3A
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.685.336.550	DISHUB
13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	494.859.234	KOMINFO
14	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	46.623.788	NAKERKOP
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	99.899.620	DPMPSTP
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	170.531.642	DISPARPORA



NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	199.004.346	KOMINFO
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.068.688.057	DIKNAS
19	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	318.166.147	DKP
20	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	64.350.000	DKP
21	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	354.845.385	DISPARPORA
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	532.322.062	DKPP
23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.195.844.138	PERDAGIN
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.466.362.883	SETDA BAGIAN KESRA
25	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	11.706.847.185	SEKRETARIAT DPR
26	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.572.752.160	BAPPPEDA
27	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.395.090.956	BADAN KEUANGAN
28	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.027.566.518	BKPP
29	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.894.769.580	BKPP
30	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.461.375.815	BAPPPEDA
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.328.563.631	INSPEKTORAT
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.297.637.175	KECAMATAN, KELURAHAN
33	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	210.394.000	KESBANGPOL
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	90.321.925	DIKNAS
35	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.544.123.910	DIKES, RS. AS



NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
36	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	76.670.286.525	PUPR
38	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.556.712.885	PERKIM
39	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.060.768.788	BPBD
40	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	30.583.141	BPBD
41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	575.804.704	NAKERKOP
42	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	388.648.414	DP2KBP3A
43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.370.807.900	PANGAN
44	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213.530.792	DLH
45	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.412.435	DKPS
46	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.933.382.455	DP2KBP3A
47	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.941.404.433	KOMINFO
48	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	160.557.586	NAKERKOP
49	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	340.551.876	DPMPSTP
50	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.984.530.275	DISPARPORA
51	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	352.313.594	DIKNAS
52	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.303.674.953	DKPP
53	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	302.634.275	DISPARPORA
54	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	53.263.424	DKPP
55	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	271.815.931	PERDAGIN
56	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.396.832.104	SEKDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
57	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.325.847.390	SEKDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
58	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.808.561.996	BADAN KEUANGAN



NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
59	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	995.189.775	INSPEKTORAT
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.107.574.201	KECAMATAN, KELURAHAN
61	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	966.087.053	KESBANGPOL
62	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	77.719.596	DIKNAS
63	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	353.229.379	DIKES
64	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	500.000.000	DLH
65	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	493.673.250	BPBD
66	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.407.531.843	DINSOS
67	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	169.756.896	NAKERKOP
68	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	425.666.124	PANGAN
69	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	833.298.836	DLH
70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	435.432.026	DKPS
71	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	279.713.843	DINSOS
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	179.999.783	DP2KBP3A
73	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	319.873.662	DPMPTSP
74	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	97.945.506	DKP
75	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	766.189.927	DKPP
76	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	175.405.881	DKPP



NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
77	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	256.742.490	PERDAGIN
78	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.278.673.228	BADAN KEUANGAN
79	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.424.835.399	KECAMATAN, KELURAHAN
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	75.442.000	KESBANGPOL
81	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	961.019.392	PUSKESMAS KOTA SELATAN
82	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.403.728.648	PUPR
83	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.965.459.572	PUPR
84	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.164.234.637	DINSOS
85	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	738.163.451	NAKERKOP
86	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.890.120	DP2KBP3A
87	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	33.354.352	PANGAN
88	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.778.526.157	DLH
89	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.108.400.382	DINSOS
90	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	390.304.296	NAKERKOP
91	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	322.572.974	DPMPSTP
92	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	158.795.883	DIKNAS
93	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	121.688.697	DISPARPORA



NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
94	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	62.627.188	DKPP
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.955.163.900	KELURAHAN, KECAMATAN
97	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	313.969.474	KESBANGPOL
98	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	11.024.243.568	PUPR
99	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.009.111.715	DINSOS
100	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	60.065.770	DP2KBP3A
101	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	280.446.584	DLH
102	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	147.291.127	DPMPSTP
103	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	743.223.390	DKPP
104	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	327.585.541	PERDAGIN
105	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.395.368.602	KESBANGPOL
106	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	269.169.671	DP2KBP3A
107	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	86.336.786	NAKERKOP
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	240.357.489	DKPP
109	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	185.767.083	PUPR
110	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	63.606.753	DLH
111	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.126.252.391	NAKERKOP
112	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	8.960.854.942	PUPR
113	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	16.830.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP





NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	85.999.233.678	PUPR
115	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	474.382.457	PUPR
116	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.035.299.376	DLH
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	668.027.308	PUPR
<b>JUMLAH</b>		<b>1.294.959.304.196</b>	



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

---

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawab dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi (LKIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkatan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan; sasaran kebijakan, dan program.

LKIP Kota Gorontalo Tahun 2021 ini menyajikan data capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, bahwa Visi Pemerintah Kota Gorontalo adalah: **“KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK” (KOTA SMART)** selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan yang ditetapkan dalam RPDJM Kota Gorontalo Periode Tahun 2019-2024. Untuk menggambarkan hubungan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah dan dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan visi Kota Gorontalo. . Laporan tersebut disusun dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan penjelasan terhadap hasil pengukuran kinerja sebagai gambaran atas tingkat capaian target indikator sasaran yang telah ditentukan, yang kemudian disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. IKU merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki, tanpa mengesampingkan indikator lain yang terkait / relevan.



## 1. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran capaian kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Kriteria Penilaian**

Skala Nilai	Kategori Penilaian
$\geq 100$	Sangat Baik
$\geq 85$ s.d $< 100$	Baik
$\geq 65$ s.d $< 85$	Cukup Baik
$\geq 50$ s.d $< 65$	Kurang Baik
$< 50$	Tidak Baik

## **2. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua RPJMD Pemerintah kota Gorontalo 2019-2024. Hasil pengukuran capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 adalah sebesar **93.71%** dengan kategori “**Baik**” yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Meskipun telah mencapai target, namun demikian masih terdapat beberapa kinerja yang capaian masih perlu peningkatan. Berikut Ringkasan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 :



**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian	
1	2		3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,37	100.00%
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.35	14,50	101.05%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 1</b>					<b>100,05%</b>
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,95	72,53	100.81%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 2</b>					<b>100.81%</b>
3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	3.1	PDRB Perkapita	Rp.	43,391.01	38,160.980	87,95%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 3</b>					<b>87.95 %</b>
4	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	4.1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	65,46	66,21	101,15%
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 4</b>					<b>101,15%</b>
5	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	5.1	Nilai Skor Adipura	Nilai	77,80	n/a	-
		<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 5</b>					<b>-</b>



No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian
1	2			3	4	5	6
6	Meningkatnya daya beli masyarakat;	6.1	Pengeluaran Per Kapita	Rp.	12,378,000	1.611.082	13,02%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 6</b>							<b>13,02%</b>
7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;	7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,00%	63.97%	99.95%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 7</b>							<b>99,95%</b>
8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	8.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koperasi dan usaha mikro	Persen	66%	56%	84.85%
9	Meningkatnya peran pemuda	9.1	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya	Persen	85%	90%	105,88%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 9</b>							<b>95.36%</b>
10	Meningkatnya kunjungan wisata	10.1	Persentase Kunjungan wisata	Persen	55%	55%	100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 10</b>							<b>100,00%</b>
11	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	11.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,5	89,20	101.94%
		11.2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,00	50,71	78.00%
		11.3	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00%



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2021	Realisasi	Capaian	
1	2		3	4	5	6	
		11.4	Nilai LPPD	Nilai	3,4252	n/a	-
		11.5	Nilai AKIP	Nilai	BB ( 75,00 )	B (65,98)	87.97%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 11</b>						<b>98,05%</b>	
12	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	12.1	Rasio polisi pamong praja per sepuluh ribu penduduk	/10000 penduduk	3.46	n/a	-
		12.2	Rasio Petugas Linmas yang diberdayakan	Rasio/Jml RT	25	25	100,00%
		12.3	Persentase pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	70	70	100,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 12</b>						<b>100,00%</b>	
13	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya	13.1	Jumlah penyelenggaraan ivent seni budaya dan keagamaan yang di fasilitasi pemerintah	Jml	2	4	200,00%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 13</b>						<b>200.00%</b>	
14	Meningkatnya Nilai Investasi	14.1	Nilai Investasi	Rp	352.000.000,000	Rp 45,910,106,164	13,02%
<b>Rata - Rata Capaian Sasaran - 14</b>						<b>13.02%</b>	
<b>Capain Rata-Rata Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo</b>						<b>93.71%</b>	

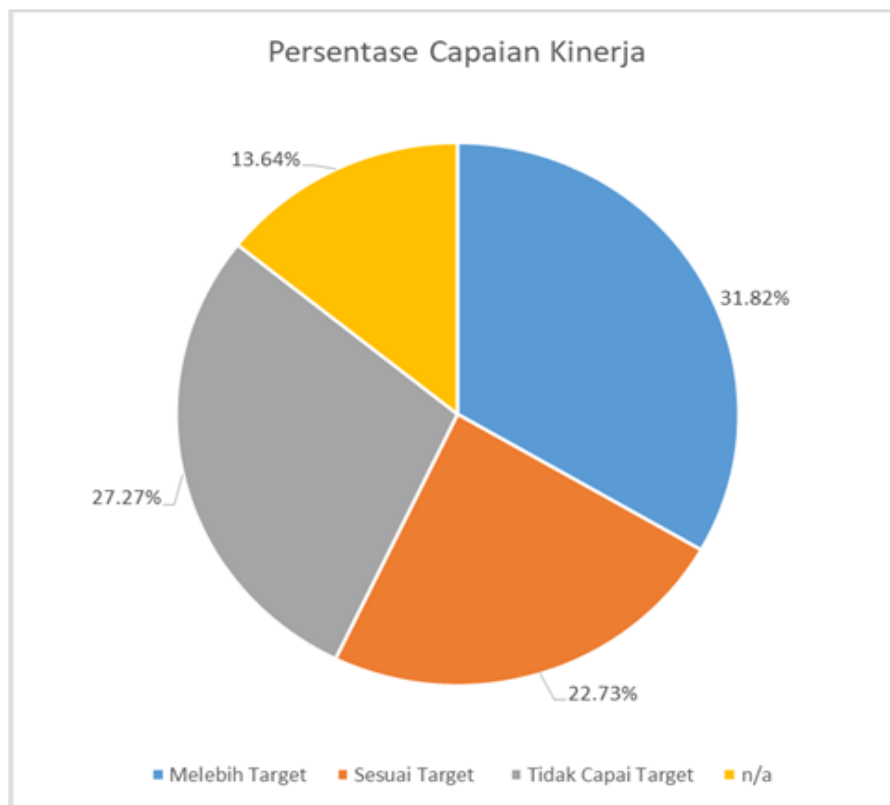
Sumber Data : Bagian Organisasi (Di Olah) Tahun 2021



Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat digambarkan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 per indikator sasaran strategis sebagaimana grafik 3.1 berikut:

**Grafik 3.1**

Persentase Capaian Kinerja Kota Gorontalo Tahun 2021



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo Tahun 2021

**Tabel 3.3**

**Capaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 Per indikator Sasaran**

No	Rata-Rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 100	Sangat Baik	7
2	≥ 85 s.d < 100	Baik	8
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik	2
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik	0
5	< 50	Tidak Baik	2
6	N/A (Belum ada Data)		3
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

Sumber Data : Bagian Organisasi Tahun 2021 (Di Olah)



Data Primer diolah 2021 Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024, untuk analisis dan capaian kinerja tersebut akan dijelaskan dibawah.

### 3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2020, pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. 6 (enam) Misi yang dijabarkan dalam beberapa Tujuan dan sasaran, diukur melalui beberapa indikator tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Gorontalo, serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut penjabaran capaian indikator tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021, sebagaimana berikut :

***Misi I : Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas***

#### 📍 Tujuan 1

**Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya**

**Tabel 3.4**  
**Indeks IPM Kota Gorontalo Tahun 2021**

NO	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	77,79	77,41	99.51%

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Penduduk bisa dikatakan berkualitas jika berkontribusi untuk kemajuan pembangunan yang telah dicapai. Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan sebagai alat ukur kualitas pembangunan sumber daya manusia yang relevan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Gorontalo terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gorontalo di tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 IPM Kota Gorontalo mengalami kenaikan menjadi 77,41. Angka IPM tersebut naik sebesar 0,28 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun 2020 sebesar 77,13.

Kemudian jika diperhadapkan dengan target IPM tahun 2021 sebesar 77,79 maka realisasinya menapai 99,51%. Hal ini dikarena adanya pembenahan-pembenahan dalam yang dilakukan Pemerintah Kota Gorontalo baik pelonggaran mobilitas masyarakat dimasa pandemi dalam kegiatan perdagangan, UKM, pertanian serta diberbagai sektor lainnya guna percepatan pemulihan ekonomi di Kota Gorontalo.

**Tabel 3.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota, Provinsi dan Nasional**  
**Tahun 2019-2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41
Provinsi Gorontalo	68,49	68,68	68,68
Nasional	71,92	71,94	71,90

Sumber : BPS Nasional 2021

Tujuan daerah ***Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya*** dengan indikator ***Indeks Pembangunan Manusia*** ditunjang oleh 3 sasaran strategis pembangunan Kota Gorontalo sebagai berikut :

**a. Sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan**

Untuk mewujudkan pembangunan dalam suatu daerah tentunya perlu didukung oleh segenap potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan di Kota Gorontalo diukur



dengan indikator “angka harapan lama sekolah” dan “angka rata-rata lama sekolah” dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.34	14.35	14,50	101.00%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.36	10.37	10,37	100.00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>100.50%</b>

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan ditempuh melalui 2 (dua) indikator yaitu angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100.50%** dengan kategori “**Sangat Baik**”. Untuk mengukur angka harapan lama sekolah tahun 2021 dari target 14,35 % dapat terealisasi sebesar 14,50 % dengan capaian sebesar **101.00%** dengan kategori “**Sangat Baik**” sedangkan angka rata-rata lama sekolah realisasinya mencapai target 10,37 % atau sebesar **100%** dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hal ini disebabkan oleh adanya Program Pemerintah Kota Gorontalo melalui salah satu Program Kartu Sejahtera, yaitu Gratis Biaya Pendidikan dari SD sampai SMP, Program Bea Siswa Miskin, Dana Operasional Sekolah (DOS), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya dari Pihak Ketiga yang diserahkan secara langsung kepada Siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Berikut dapat kami sajikan data pelayanan pendidikan yang termasuk dalam program Kartu Sejahtera Pemerintah Kota Gorontalo tiga tahun terakhir.

**a) Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah tahun 2021 dari target 14,35 % dapat terealisasi 14,50 % dengan capaian sebesar **101%** dengan kategori “**Sangat Baik**”. Disamping itu Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Pelayanan Pendidikan**

NO	TAHUN	JUMLAH SISWA	JUMLAH DANA (Rp)	KET
1	2019	34.557	33.690.347.455	PAUD, SD & SMP
2	2020	39.904	27.644.283.779	PAUD, SD & SMP
3	2021	37.772	33.186.156.169	PAUD, SD & SMP

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gorontalo 2021

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.56	14,50	99.59%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.46	10,37	99.14%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>99.36%</b>

Sumber: BPS Kota Gorontalo 2021

Adapun jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Realisasi untuk angka harapan lama sekolah adalah sebesar 99.59%, sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 99.14%. Sehingga diperoleh rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap kondisi akhir RPJMD sebesar 99,36% dengan Kategori “Sangat Baik”. Adapun tabel capaian selama tiga tahun sebagai berikut

**Grafik 3.2****Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 - 2021**

Sumber Data : BPS Nasional, 2021

Harapan Lama Sekolah Kota Kota Gorontalo tahun 2021 adalah sebesar 14,5 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 14,5 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus jenjang pendidikan Diploma III. Jika dilihat dari target tahun 2021 sebesar 14,35, maka capaian angka harapan lama sekolah telah melampaui target yang ditetapkan.

**❖ Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian sasaran :**

1. Program Pemerintah Kota Gorontalo dalam peningkatan mutu pendidikan lewat pemberian beasiswa. Tujuan program ini untuk memastikan mereka anak-anak yang kurang beruntung, tapi memiliki kecerdasan yang bagus



untuk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai diperguruan tinggi. Pemerintah ingin mereka ini menjadi SDM yang bagus dan baik, paling tidak kedepan bisa berkontribusi untuk membangun daerahnya.

2. Upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan pemerataan pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur penunjang lainnya yang memadai khususnya di daerah-daerah terpencil dalam mendukung aksesibilitas masyarakat dalam pendidikan.
3. Hal yang juga mendukung ketersediaan dan perbaikan yang dicapai dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kota Gorontalo salah satunya adalah layanan perpustakaan. Selain layanan perpustakaan sekolah, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan juga terus meningkatkan layanan perpustakaan dengan mengembangkan layanan perpustakaan keliling.

#### ❖ **Permasalahan yang dihadapi**

1. Ketidakmampuan ekonomi orang tua. Berdasarkan data kemiskinan di Kota Gorontalo tingkat kesejahteraannya rendah. Kondisi ini merupakan salah satu pemicu pada besarnya angka putus sekolah pada anak usia sekolah. Kondisi ini berakibat pada kesulitan anak dalam belajar serta motivasi anak untuk sekolah berkurang.
2. Rendahnya keterpenuhan kebutuhan guru yang belum merata di daerah Kota Gorontalo

#### ❖ **Solusi**

1. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam hal mencegah terjadinya anak putus sekolah adalah memberi motivasi, melakukan pembinaan, melaksanakan pendidikan kesetaraan. Disamping itu, pemberian kepada siswa dari keluarga miskin diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan si anak yang memberatkan orang tua. Beberapa program beasiswa lainnya seperti Beasiswa Miskin atau melalui program PKH terus dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjamin anak usia sekolah terpenuhi kebutuhannya untuk sekolah khususnya dalam mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Melaksanakan monitoring ketat dan periodik terhadap pelaksanaan Progra Keluarga Harapan, dimana sasaran dari program tersebut sangat jelas





yakni dalam rangka untuk mengantisipasi agar anak tidak putus sekolah dan anggaran PKH jangan sampai disalahgunakan oleh orang tuanya maupun pihak lain.

**b. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap daerah. Pada sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan di Kota Gorontalo dapat diukur melalui indikator “*Angka Harapan Hidup*” dengan capaian kinerja sebagai berikut:

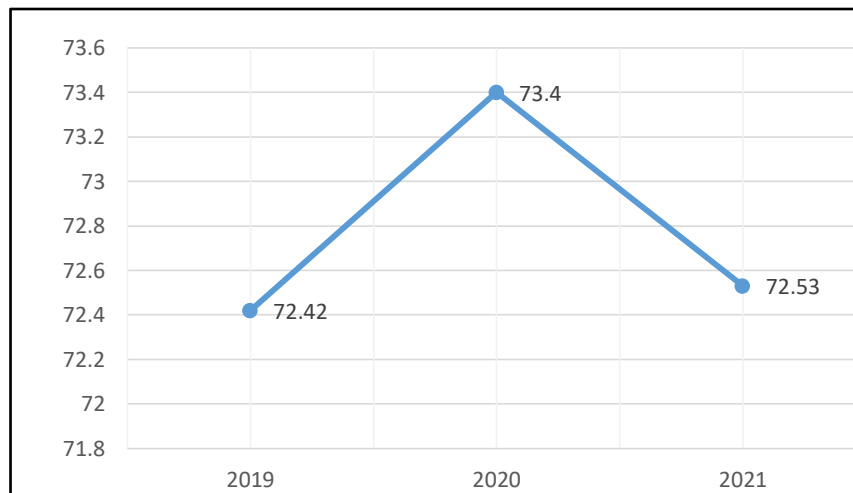
**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas layanan kesehatan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72.42	71,95	72.53	101.00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>101.00%</b>

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan kesehatan tahun 2021 ditunjukkan oleh indikator angka harapan hidup dengan capaian **101%** atau kategori “**Sangat Baik**” dari target 71,95 % dan telah terealisasi sebesar 72,53 %. Realisasi tahun 2021 meningkat sebesar 0,04 dari tahun 2020. Angka harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Angka harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka harapan hidup dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini seiring dengan peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi serta Promosi Kesehatan untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta peningkatan kualitas pelayanan secara Komprehensif, sehingga Derajat Kesehatan Masyarakat di Kota Gorontalo dapat tercapai secara maksimal.

Berikut Realisasi kinerja Angka Harapan Hidup Kota Gorontalo selama tiga tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.3**  
**Angka Harapan Hidup 2019-2021**



Sumber Data : BPS Nasional, 2021

Dari grafik 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kota Gorontalo menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada Tahun 2019 naik sebesar 0.8 menjadi 73,4% di tahun 2020 namun pada tahun setelahnya mengalami penurunan sebesar 0,87 sehingga pada tahun 2021 turun menjadi 72,53%.

#### ❖ Faktor Penyebab Tidak Tercapai Angka Harapan

1. Pembatasan Pergerakan kegiatan masyarakat di beberapa daerah di Kota Gorontalo mengakibatkan kegiatan layanan kesehatan baik yang ada di Puskesmas dan Rumah sakit, rujukan bagi penyakit yang beresiko tinggi, deteksi dini bayi yang baru kegiatan kemitraan bidan dan dukun, kegiatan Donor Darah melalui Puskesmas dan kelurahan, pendampingan dilahirkan dan dana bantuan operasional kesehatan belum bisa berjalan dengan optimal.
2. Sarana Prasarana kegiatan pelayanan kesehatan yang belum merata-rata dalam menunjukkan kegiatan persalinan bayi di Kota Gorontalo.

**❖ Solusi**

1. Pemerintah Kota Gorontalo Pada Tahun 2022 telah menetapkan 20 Program percepatan yang salah satunya Pelonggaran PPKM guna mobilitas masyarakat khususnya di bidang kesehatan dapat berjalan secara optimal.
2. Dinas Kesehatan berserta UPTD telah menyusun rencana pengadaan Sarana Prasana penunjang kegiatan kesehatan terkhususnya persalinan guna agar dapat berjalan secara maksimal.

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Pelayanan Kesehatan**

No	Tahun	Tempat pelayanan			Jumlah
		Puskesmas (Jiwa)	RSAS (Jiwa)	RS. OTanaha (Jiwa)	
1	2019	69.438	6.828	6.449	<b>82.715</b>
2	2020	53.518	108.683	3.988	<b>166.189</b>
3	2021	51.149	5.779	3.080	<b>60.008</b>

Sumber Data: Dikes, RSAS, RS Otanaha 2021

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Pelayanan Kesehatan (Persalinan / Kelahiran)**

No	Tahun	Tempat Pelayanan		Jumlah
		Puskesmas (Jiwa)	Rumah Sakit (Jiwa)	
1	2019	2.230	1.829	<b>4.053</b>
2	2020	2.393	1.639	<b>4.032</b>
3	2021	1.790	1.923	<b>3.713</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.413</b>	<b>5.391</b>	<b>11.804</b>

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo Tahun 2021

Pelayanan kesehatan untuk persalinan dan kelahiran dimulai sejak kehamilan usia trimester pertama berupa pemeriksaan kehamilan gratis, pemahaman tentang asupan gizi ibu hamil melalui pelayanan posyandu di disemua kelurahan hingga proses melahirkan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang telah dilayani persalinan atau kelahiran sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak



11.804 jiwa, sehingga mempengaruhi tingkat angka harapan hidup penduduk di Pemerintah Kota Gorontalo.

**c. Sasaran meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat**

Capaian Kinerja meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Publik yang Mendorong Pendapatan Masyarakat Tahun 2021**

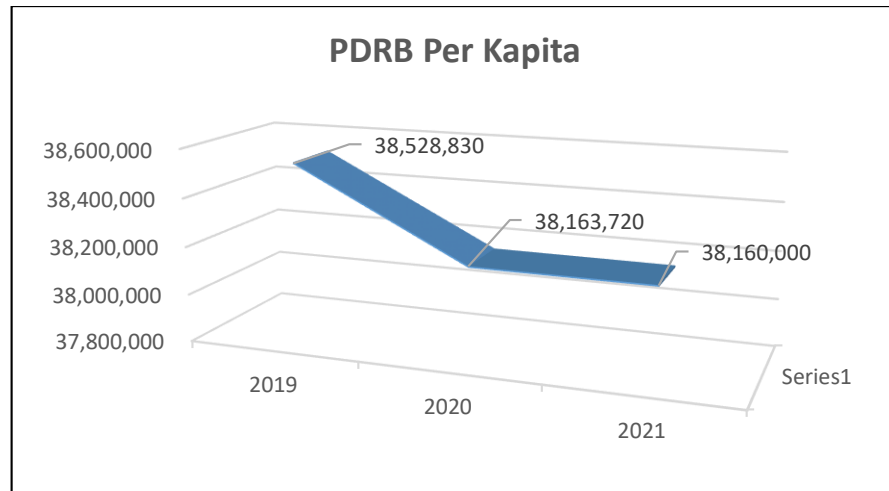
No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	PDRB Perkapita	Rp	38,528.830	43,391.000	38.160.000	88.95%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>88.95%</b>

Sumber Data: BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Publik yang Mendorong Pendapatan Masyarakat diperoleh rata-rata kinerja sebesar **88.95%** atau kategori "**Baik**". Berikut grafik perbandingan PDRB Perkapita di Kota Gorontalo mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Grafik 3.4

## PDRB Perkapita Tahun 2019 - 2021



Sumber Data : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas diketahui pencapaian kinerja PDRB perkapita Kota Gorontalo menunjukkan tren yang cukup baik pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 38,168,000

#### ❖ Faktor Yang Mempengaruhi Capaian

1. Menurunnya kinerja PDRB Perkapita Kota Gorontalo di sebabkan oleh Perkembangan PDRB di Kota Gorontalo yang mengalami fase penurunan dari tahun sebelumnya. Beberapa sektor tersebut diantaranya, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, sektor Transportasi dan Pergudangan.
2. Penyebab menurunnya pertumbuhan PDRB Kota Gorontalo Pada tahun 2021 adalah pandemic Covid-19 yang mengakibatkan beberapa sector usaha yang di sebutkan diatas mengalami penurunan. Meskipun disituasi pandemic Covid-19, salah satu sector yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik adalah sector Jasa Keuangan dan Asuransi yang berkontribusi lebih besar dibandingkan tahun 2020.

#### ❖ Solusi

1. Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang mendorong pendapatan masyarakat antara lain : Melalui program Peningkatan Kesempatan Kerja, melakukan penyusunan Bursa Kerja, Pengembangan Kelembagaan produktifitas dan pelatihan

kewirausahaan, Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.

2. Kegiatan pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan wirausaha baru yang merupakan lulusan LPK dan LLK yang telah dilatih berdasarkan kompetensi berbasis masyarakat, melalui kegiatan ini diberikan bantuan sarana usaha, Berikut beberapa tabel terkait upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Data Penerima Bantuan Sarana Usaha**  
**Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas Dan Pelatihan**  
**Kewirausahaan Tahun 2021**

NO	Jenis Usaha	Alamat	Jumlah
1	Pembuat kue	Kota Gorontalo	12 Orang
2	Bengkel Las	Kota Gorontalo	6 Orang
3	Instalasi Penerangan	Kota Gorontalo	6 Orang
4	Salon Kecantikan	Kota Gorontalo	8 Orang
5	Las Listrik	Kota Gorontalo	1 Orang
<b>Total</b>			<b>33 Orang</b>

*Sumber Data : Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kota Gorontalo 2021*



**Tabel 3.14**
**Data Penerima Padat Karya Infrastruktur Tahun 2021**

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	PELAKSANA
1	Kelurahan Lekobalo	Jln. Rabat Beton 210 M	88 Tenaga kerja penganggur/setengah penganggur laki2 dan perempuan
2	Kelurahan. Wongkaditi Barat	Jln. Rabat Beton 250 M	88 Tenaga kerja penganggur/setengah penganggur laki2 dan perempuan

Sumber Data : Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kota Gorontalo


**Tabel 3.15**
**Data Kegiatan Pelatihan  
LLK UMKM Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Jurusan	Jumlah Peserta Yang Mendaftar	Jumlah Peserta Yang Dilatih
1	Tata Rias	30	16
2	Otomotif	36	16
3	Las Listrik	24	16
4	Komputer	68	16
<b>Jumlah</b>		<b>158</b>	<b>64</b>

Sumber Data : Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kota Gorontalo 2021

**Misi II : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector public****☉ Tujuan 2****Meningkatnya fungsi layanan Kawasan Perkotaan dan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan****❖ Persentase Peningkatan Pelayanan Perkotaan****Tabel 3.16****Persentase Layanan Perkotaan Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	7	8
1	Persentase Pelayanan Perkotaan	Persen	41,38	30	72,50%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>72,50%</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 Pelayanan perkotaan meliputi 29 jenis pelayanan yang mempertimbangkan fungsi dan peran kota yang tidak hanya berdasar pada banyaknya penduduk yang harus dilayani. Sebagai ukurannya capaian penyediaan infrastruktur disesuaikan klasifikasi dan tipologi perkotaan.

Secara umum dari 29 jenis pelayanan tersebut pada tahun 2021 Pemerintah Kota Gorontalo telah berusaha meningkatkan penyediaan 29 jenis layanan perkotaan pada 10 (sepuluh) kawasan yang mantap dengan pelayanan perkotaan diantaranya :

- 1). *Kawasan Jalan Ahmad Yani;*
- 2). *Kawasan Agus Salim;*
- 3) *Kawasan Santorini;*
- 4).*Kawasan Lasjeber;*





- 5).Kawasan Kota Baru;
- 6).Kawasan Benteng Otanaha;
- 7).Kawasan Simpang Lima;ai
- 8).Kawasan Dembe I;
- 9).Kawasan Kuliner kalimadu;
- 10) Kawasan Religi dan Kota Tua.

Namun pada tahun pelaksanaan, realisasi pembenahannya hanya berada pada 3 (tiga) kawasan yakni kawasan Lasbejer, kawasan Dembe I dan Kawasan Otanaha, dengan realisasi 9 jenis pelayanan perkotaan. Rendahnya capaian atas kinerja ini karena adanya refocusing anggaran, sehingga realisasi atas indikator **“Persentase Peningkatan Pelayanan Perkotaan”** tercapai sebesar **72,50%**.

Hal ini disebabkan oleh beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana akibat adanya Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanggulangan dampak Pandemic Covid 19.

Terkait kegiatan pelayanan perkotaan dapat dilihat dari kondisi infrastruktur seperti Pelayanan Air Minum, Pelayanan Drainase, Prasarana Jalan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.17**  
**Perkembangan Sarana dan Penyediaan Air Bersih di 10 Kawasan di Kota**  
**Gorontalo**  
**Tahun 2019 - 2021**

No	Uraian	Satuan	Penyediaan Air Bersih		
			2019	2020	2021
1	PDAM (Sambungan)	Unit	27.431	28,370	30,092
2	Sumur Gali (Unit)	Unit	10.047	10,047	10,047
3	Sumur Suntik (unit)	Unit	4.485	4,485	4,485
4	Hidran Umum (Unit)	<b>Unit</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	226
<b>Total</b>		<b>Unit</b>	<b>42.189</b>	<b>43.128</b>	<b>44.850</b>

Sumber PDAM, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan 2021



**Tabel 3.18**  
**Perkembangan Kondisi Saluran Drainase /Gorong–Gorong**  
**Di 10 Kawasan Kota Gorontalo Tahun 2019–2021**

Kondisi Saluran	2019	2020	2021
Baik	66.722,55	66.722,55	66,722,55
Rusak	14.777,54	14.777,54	14,777
Rusak Berat	69.503,91	69.503,91	69,503.91
<b>Jumlah</b>	<b>151.004,00</b>	<b>151.004,00</b>	<b>151,004.00</b>

Sumber Dinas PUPR 2021

**Tabel 3.19**  
**Perkembangan panjang Kondisi jalan di 10 Kawasan Kota Gorontalo**  
**Tahun 2019–2021**

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)		
	2019	2020	2021
Mantap	191,914	157,782	167,097
Sedang	13,966	21,145	20,749
Rusak Ringan	14,844	0	0,000
Rusak Berat	16,565	51,717	49,443
<b>Jumlah</b>	<b>237,289</b>	<b>230,544</b>	<b>237,289</b>

Sumber Dinas PUPR 2021

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelayanan perkotaan masih terdapat beberapa kekurangan dengan adanya kondisi yang rusak ringan, juga layanan infokom yang belum menyeluruh. Untuk pelayanan Energi Listrik di Kota Gorontalo menggunakan pelayanan tingkat regional yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sehingga jika ada permasalahan mudah terjadi gangguan membutuhkan waktu dalam penanganannya



## ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.20  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,74	64,80	62,55	96.53%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>96.53%</b>

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Realisasi kinerja pada indikator kinerja “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**” ditahun 2021, diperoleh Nilai sebesar 62,55 dengan realisasi capaian sebesar **96.53%** dengan kategori “**Baik**”. Pencapaian realisasi target yang ditetapkan dikategorikan sangat baik disebabkan oleh kinerja Intervensi Kegiatan Program kerja khususnya untuk pengawasan kualitas air terpenuhi dengan baik serta pengawasan Indeks Kualitas Udara (**IKLU**) dan Indeks Tutupan Hutan (**ITH**) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Namun demikian dari hasil IKLH masih perlu adanya upaya yang dilakukan diantaranya, membangun kerjasama lintas sektor, menata kebijakan-kebijakan teknis, Reboisasi, pengelolaan Daerah Air Sungai (DAS), menjaga kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar, tidak membuang sampah ke sungai, dan mengurangi intensitas limbah rumah tangga. sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 diperoleh sebesar **96.53%**.

Hasil pengukuran realisasi kinerja pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” Kota Gorontalo diukur melalui 3 (tiga) indikator, yang terdiri dari :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Air (**IKLA**)  
diperoleh dari Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2021
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Udara (**IKU**)  
diperoleh dari Data Indeks Kualitas Udara Metode Passive Sampler dari KLHK Melalui DLHK Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
- c. Indeks Kualitas Lingkungan Tutupan Hutan (**IKTH**)



diperoleh dari Data IKL dari KLHK Melalui DLHK Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

Berdasarkan indikator tersebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo di peroleh sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} &+ (IKA 30\%) + (IKU 30\%) + ITH (40\%) \\ &+ 16,98 + 24,20 + 21,38 \\ &+ \underline{\underline{62,55 \text{ (Nilai IKLH)}}} \end{aligned}$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut:

Nilai Interval	Kategori
$> 90$	Unggul
$82 < X < 90$	Sangat Baik
$74 < X < 82$	Baik
$66 < X < 74$	cukup
$58 < X < 66$	kurang
$50 < X < 58$	Sangat Kurang
$X < 50$	Waspada

Berdasarkan data rentang nilai dan kategori diatas dapat disimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Gorontalo pada tahun 2021 berada dalam posisi “**Kurang**”. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Gorontalo masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat.

Tujuan Daerah ***Meningkatnya fungsi layanan Kawasan Perkotaan dan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan*** dengan indikator kinerja ***Persentase Peningkatan Pelayanan Perkotaan*** ditunjang oleh 1 (satu) sasaran strategis pembangunan Kota Gorontalo sebagai berikut :

- a. **Sasaran Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan



sosial dan kawasan permukiman diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	61.39	65,46	66,21	101,14%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						101,14%

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup 2021

Sasaran Strategis meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup Perkotaan diperoleh rata-rata kinerja sebesar 101,14% atau kategori “Sangat Baik”. Realisasi kinerja pada indikator kinerja “Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)” ditahun 2021, diperoleh Nilai sebesar 66.25 dari target 65.46 dengan realisasi capaian 101% kategori “Sangat Baik”. Realisasi atas capaian kinerja ini menurun sebesar 3,62% jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sebesar 69,87%. Pencapaian atas kinerja tersebut dihitung berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan Realisasi 70,41% menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 77,57% karena diakibatkan oleh adanya refofusing anggaran sehingga jalan yang rusak berat maupun rusak ringan belum tertangani dengan baik.
2. Penyelenggaraan Infrastruktur air bersih dapat tercapai dengan Realisasi 88.93% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 68.10% karena perhitungan tahun sebelumnya



berdasarkan kepala keluarga dan tahun ini dihitung berdasarkan jumlah jiwa sesuai perhitungan standar pelayanan minimum (SPM).

3. Penyelenggaraan Drainase dapat tercapai dengan realisasi 32% menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 99,81% karena pada tahun ini dengan adanya refofusing anggaran sehingga pekerjaan lebih difokuskan pada penyelesaian masterplan drainase.
4. Penyelenggaraan Infrastruktur Air Limbah dengan realisasi 88,36% meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 81,80%. Seperti pada pelayanan air bersih untuk pelayanan air limbah juga mengalami perubahan cara perhitungan yang semula menggunakan jumlah kepala keluarga menjadi jumlah jiwa.
5. Penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Permukiman dapat tercapai dengan realisasi 100% yang di dukung oleh Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan oleh berbagai stakeholder untuk mewujudkan Program Kotaku. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana realisasi atas kinerja tersebut berada diangka 39,70%
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tidak terealisasi 50% dengan penanganan pada korban bencana banjir dan Jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi atas kinerja tersebut berada diangka 60%.
7. Penyelenggaraan Transportasi dapat tercapai dengan realisasi 50 % karena kawasan yang telah ditargetkan pada tahun 2021 terlayani dengan transportasi darat yang pada hal ini moda angkutan Bentor. Realisasi atas kinerja ini menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.
8. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi dapat tercapai dengan realisasi 50% karena pemenuhan kebutuhan bandwich dalam rangka pengembangan *e-goverment* dan *e-commercial* pada 60 titik lokasi pelayanan. Realisasi atas kinerja ini menurun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 92%.



**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	69,87	65,45	66,21	101,16
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>						101,16

Sumber Data : Dinas PUPR 2021

Rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman terhadap kondisi akhir RPJMD sebesar 101.16 % atau kategori “Sangat Baik”.

❖ **Faktor Pendukung Capaian Kinerja**

Semangat pencapaian RPJM yang selalu diawasi langsung oleh walikota, wakil wali kota serta sekda yang selalu mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi pembangunan merupakan pemicu semangat ASN dalam melaksanakan tugas keseharian dengan arahan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Juga dengan bantuan stake holder dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam program KOTAKU yang dimotori langsung oleh orang yang berkompeten dan berpengalaman dalam bidang infrastruktur.

❖ **Permasalahan yang dihadapi**

Adanya refofusing anggaran dan pandemic yang dialami menjadi batu sandungan dalam pencapaian target

❖ **Solusi**

1. Menerapkan Perencanaan seefisens mungkin
2. Menganalisis Program Kegiatan dan sub kegiatan yang lebih focus pada ketercapaian



**b. Sasaran Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan diukur dengan 1 indikator nilai Skor Adipura namun pada tahun 2021 belum terlaksana :

**Tabel 3.23**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan Tahun 2021**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Skor Adipura	Nilai	n/a	78	n/a	-
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						-

**Tabel 3.24**  
**Capaian Kinerja Sasaran Sasaran meningkatnya Capaian Penilaian Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Skor Adipura	Nilai	81.00	n/a	-
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>					-

Untuk Indikator Sasaran kinerja Nilai Skor Adipura tahun 2021 mentargetkan nilai 81, akan tetapi realisasi kinerja pada **“Nilai Skor Adipura”** di tahun 2021 belum dapat dilaksanakan oleh karena adanya kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tertuang dalam surat edaran Nomor : 5.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 per tanggal 13 juli 2020 perihal kegiatan





adipura, yang berisi untuk tidak melaksanakan penilaian ditahun rencana karena adanya Pandemic Covid 19.

Demikian pula untuk capaian Kinerja Sasaran meningkatnya Capaian Nilai Skor Adipura Tahun 2021 terhadap Kondisi Akhir RPJMD belum dapat diukur. Akan tetapi upaya untuk menunjang pencapaian penilaian Adipura Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan kegiatan antara lain :

1. Melaksanakan pemantauan, pengecekan, pemotretan dan monitoring keseluruhan lokasi penilaian Adipura.
2. Pembuatan Dokumen Non Fisik Adipura
3. Melakukan sosialisasi budaya bersih, budaya malu membuang sampah tidak pada tempatnya.

Dari kegiatan ini maka pemahaman masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan semakin baik, hal ini berkat kerja sama seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga lingkungannya, membuang sampah pada tempatnya.

**Misi III : Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian**

📍 **Tujuan 3**

**Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran**

**Tabel 3.25**  
**Persentase Angka Kesmiskinan Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Persentase Angka Kemiskinan	Persentase	5,59	5,50	5,93	92.74%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>92%</b>

Sumber : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Persentase kemiskinan di Kota Gorontalo pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, pada tahun 2019 persentase angka kemiskinan penduduk Kota Grontalo berada pada angka 5,45%, setelah itu pada Tahun 2020



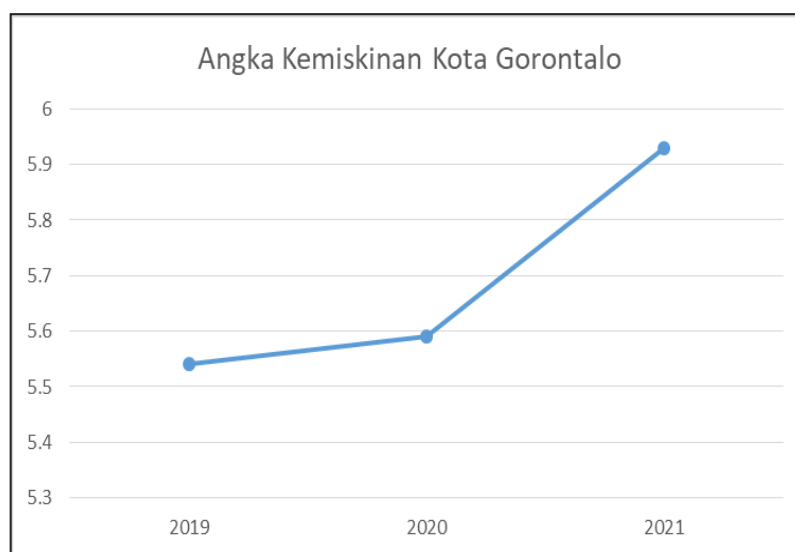
naik menjadi 5,59% kemudian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,34% sehingga menjadi 5,93% dengan kategori “**Baik**” serta belum mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan.

Penyebab meningkatnya angka kemiskinan Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tidak terlaksana; banyaknya usaha mikro kecil, menengah yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sudah tidak beroperasi; menurunnya daya beli masyarakat; terjadinya PHK sebagai akibat dari dampak Pandemic Covid 19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19)

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Akhir yaitu sebesar 8,31% maka presentase capaian sebesar **83.31,00%** dengan kategori “**Cukup Baik**”. Kondisi pandemi ini mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan hasil survei sosial demografi BPS nasional, kelompok masyarakat lapisan bawah berpendapatan rendah, 70 persen mengalami penurunan pendapatan. Sementara untuk masyarakat berpendapatan tinggi, yakni di atas Rp 7,2 juta, sebanyak 30 persen berpendapatannya berkurang selama pandemi. sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin karena terdampak Covid-19 yang mengakibatkan tingkat hunian pada hotel dan penginapan mengalami penurunan.

### Grafik 3.5

Tingkat Kemiskinan Kota Gorontalo Tahun 2019-2021





Tujuan daerah **Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran** dengan indikator **Persentase angka kemiskinan** ditunjang dengan 1 sasaran strategis sebagai berikut:

**a. Sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat**

Capaian Kinerja meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.26**  
**Pengeluaran Per Kapita Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp.	12,298,000	12,378,000	1.611.082	13.02%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>13.10%</b>

Sumber : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat tahun 2021 adalah sebesar **13,02%** atau kategori **“Sangat kurang”**, dimana pada realisasi indikator **“Pengeluaran per kapita”** Kota Gorontalo sebesar Rp. 1,611.082 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat Kota Gorontalo dengan indikator *Pengeluaran Per Kapita* pada tahun perencanaan dipengaruhi oleh menurunnya pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota baik dari sektor pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka komoditas dan jasa. Selain itu dengan adanya PPKM pandemic covid-19 di Lingkungan Kota Gorontalo yang menyebabkan mobilitasi masyarakat dibatasi sehingga kegiatan sosial serta ekonomi dikalangan masyarakat terbatas. Disamping itu jika sandingkan dengan terhadap target akhir RPJMD untuk pengeluaran per kapita adalah 47,53% dari target akhir RPJMD Rp. 25,829,832, sehingga di peroleh rata-rata capaian kinerja sasaran terhadap kondisi akhir RPJMD sebesar **47,53%** kategori **“Tidak Baik”**.

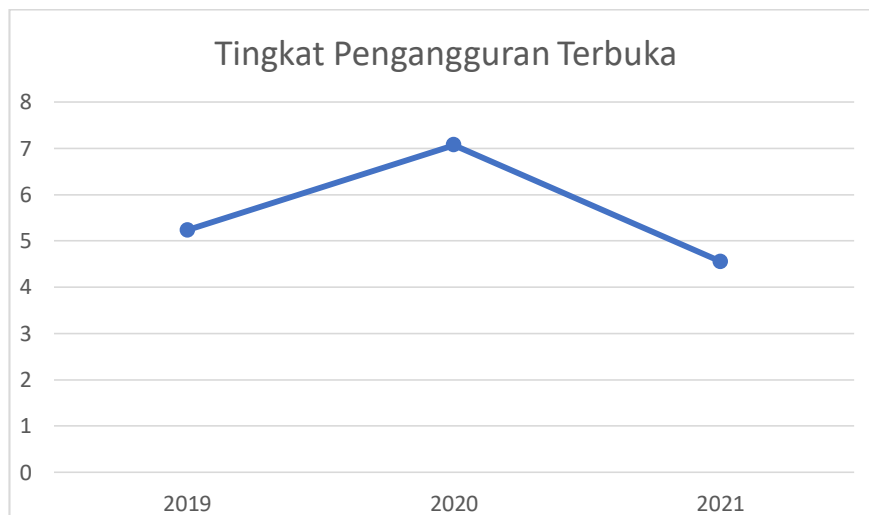
**Tabel 3.27**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,52	6.60	4,55	68.94%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>68.94%</b>

Sumber : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah Kota Gorontalo maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2019 sampai dengan 2021

**Grafik 3.6**



. Sumber : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari 5,23 pada tahun 2019, mengalami kenaikan menjadi 7,07 pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 4,55. Jika di lihat dari table ringkasan capaian indikator kinerja tujuan nilai capaian target



tahun 2021 tersebut diatas tidak melebihi dari target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian sebesar dalam RPJMD sebesar 6,60 dengan realisasi sebesar 4,55.

Adapun sebab yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kota Gorontalo, disebabkan oleh:

1. Adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pelaku usaha harus mengurangi produktivitas kerja yang berakibat pada terjadinya pengurangan pekerja dan PHK.
2. Tidak sesuainya kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki atau kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja disebabkan oleh kurang adanya link and match antara dunia pendidikan (lembaga ketrampilan/ LPK/ BLK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)).
3. Produktivitas tenaga kerja Kota Gorontalo pada tingkat pendidikan dan ketrampilan (kompetensi) pada usia produktif sebagian besar berasal dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak memiliki skill yang cukup untuk merespons perkembangan teknologi di era digitalisasi.

Tujuan daerah **Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran** dengan indikator kinerja ***Tingkat Pengangguran Terbuka*** di Kota Gorontalo ditunjang dengan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

**a. Sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja**

Untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat tentunya ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi kerja, dimana dapat disajikan data capaian kinerja meningkatnya partisipasi angkatan kerja diukur dengan 1 indikator dengan capaian sebagai berikut :



**Tabel 3.28**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64.25	64.46	63.96	99.95%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>99.95%</b>

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar **99.95%** atau kategori "**Baik**". Realisasi kinerja pada indikator kinerja "**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**" di tahun 2021, diperoleh persentase sebesar 63.96 jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 64,25. Penyebab menurun capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Gorontalo di pengaruhi oleh jumlah angkatan kerja yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1.117 jiwa pada tahun 2021.

Dalam upaya mengurangi menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berusaha melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ketenagakerjaan, meskipun beberapa program yang mendukung pencapaian kinerja di refocusing dan di alihkan untuk penanganan pandemic covid-19. Upaya tersebut antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Penyusunan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus
3. Memberikan fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.

**Grafik 3.7**
**Partisipasi Angkatan Kerja Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2021**


Jika dilihat dari grafik diatas tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Gorontalo mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 63,96% hal tentu disebabkan karena tidak berimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi ekonomi dan kondisi pandemic covid-19, disamping itu juga rendahnya kualitas angkatan kerja serta kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja.

**Tabel 3.29**
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,30	63.96	95.47%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					95.47%

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo Tahun 2021



Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka diperoleh persentase capaian sebesar 95.47% dengan kategori “Baik”.

**b. Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro**

Capaian Kinerja meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro diukur dengan 2 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.30**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	5	7	8
1	Koperasi Aktif dan Sehat	Persen	75,00%	56,00%	74,66 %
2	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya	Persen	85,00%	90,00%	105,88
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>90.27%</b>

Pada Tahun 2021 Jumlah Koperasi Aktif 183 dari Jumlah Koperasi yang terdata sebanyak 326 Koperasi, dibanding tahun 2020 jumlah koperasi aktif 160 Koperasi dari 304 koperasi yang berhasil didata. Apabila dipresentasikan sebesar 54 %. Pada Tahun 2021 terdapat 144 Koperasi yang tidak aktif, 43 Koperasi diantaranya telah di rekomendasikan oleh Kementerian untuk di bubarkan di karenakan ketidakaktifan yang sangat lama dari 43 Koperasi tersebut dan juga dari 144 Koperasi tidak aktif tersebut telah dilaksanakan Revitalisasi terhadap 3 Koperasi.

Koperasi yang sesuai standar kompetensi manajemen pengembangan koperasi merupakan koperasi aktif yang berkualitas di Kota Gorontalo pada tahun 2021 ditargetkan sejumlah 80 koperasi dikelola sesuai standar kompetensi pengembangan koperasi dan tercapai sejumlah 100 koperasi. Jumlah Usaha mikro kecil menengah tahun 2021 sebanyak 10255 dan yang terfasilitasi dalam Pembinaan manajemen sebanyak 2822 UMKM dan yang telah meningkat omsetnya sebanyak 2710 UMKM Hal ini meningkat





dari tahun 2020. Dari 335 UMKM yang dibina setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dan terdata adalah 295 UMKM yang mengalami peningkatan omset. Pembinaan kewirausahaan diberikan kepada pelaku usaha potensial Produksi baik barang, jasa maupun pelaku usaha home industri sehingga nantinya dapat diharapkan adanya peningkatan kapasitas produksi, asset maupun omset dari usaha.

**Tabel 3.31**  
**Capaian Pembangunan Urusan Koperasi**

No	Kinerja	Satuan	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	Unit	300	304	326
2	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	42.575	41.904	20.858
3	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	153	160	183
4	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	147	144	143

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa koperasi sejak tahun 2019 awalnya berjumlah 300 koperasi berkembang setiap tahun hingga tahun 2021 sejumlah 326 ini menandakan bahwa koperasi sudah lebih memasyarakat, dan telah menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat.

❖ **Faktor Pendukung meningkatnya kinerja pada indikator ini sebagai berikut :**

1. Adanya tenaga pendamping koperasi yang selalu memberikan penyuluhan bagi koperasi – koperasi yang ada di Kota Gorontalo
2. Struktur kepengurusan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus koperasi sampai pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).



3. Adanya kegiatan pengembangan SDM Pengelola Koperasi agar dapat mengembangkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi melalui diklat perkoperasian.
  4. Memberlakukan himbauan, teguran dan pembinaan sampai pendampingan koperasi yang mangkir dalam melakukan RAT sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan koperasi.
  5. Memberikan penilaian dan penghargaan terhadap koperasi yang berhasil, meningkatkan kualitas dan badan hukum koperasi,
  6. Memonitoring serta meningkatkan koordinasi kepada stakeholder secara terus menerus, sehingga ketercapaian target pada sasaran ini dapat dikendalikan dengan baik.
- ❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan. Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dapat dilihat pada tabel 3.21 dibawah ini :

**Tabel 3.32**  
**Capaian Pembangunan Urusan Koperasi**

INDIKATOR SASARAN	TARGET	CAPAIAN	PENYEBAB	SOLUSI
Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang dikembangkan produk dan pemasarannya	65%	54%	Komitmen Bidang Koperasi dan UKM dalam mewujudkan kinerja ditanganinya sangat tinggi	Target kinerja disesuaikan situasi dan kondisi pada revisi renstra

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM 2021

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Pelaksanaan program pembinaan koperasi sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Pada tahun 2021 sejumlah koperasi berprestasi telah meraih penghargaan



sebagai koperasi berprestasi tingkat Nasional, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota Gorontalo sebagai berikut :

- Koperasi Kosika Ponua (Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional)
  - KPRI Pelita SMK 1 Gorontalo ( Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi)
  - KPRI Penunjang (Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Gorontalo)
  - KPRI Lapas (Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Gorontalo)
  - Kopkar Maritim (Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Gorontalo)
2. Pelatihan manajemen koperasi yang untuk tahun 2021 telah dilatih sebanyak 50 orang pengurus koperasi.

**Tabel 3.33**  
**Persentase Koperasi dan Usaha Mikro**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang meningkat kapasitas kelembagaannya	75%	88%	117,73%	Sangat Baik

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM 2021

Selanjutnya untuk indikator kinerja **“Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang meningkat kapasitas kelembagaannya”**, Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan sebanyak 75% usaha mikro yang naik kelas dari pada tahun 2021. Dari hasil olah data dapat dilihat bahwa kinerja pada indikator ini menunjukkan hasil capaian kinerja sebesar **117,73%**, kategori **“Sangat Baik”**

Jumlah Usaha mikro kecil menengah tahun 2021 sebanyak 10255 dan yang terfasilitasi dalam Pembinaan manajemen sebanyak 2822 UMKM dan yang telah meningkat omsetnya sebanyak 2710 UMKM Hal ini meningkat dari tahun 2020. Dari 335 UMKM yang dibina setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dan terdata adalah 295 UMKM yang mengalami peningkatan omset. Pembinaan kewirausahaan diberikan kepada pelaku usaha potensial Produksi baik barang, jasa maupun pelaku usaha home industri sehingga nantinya



dapat diharapkan adanya peningkatan kapasitas produksi, asset maupun omset dari usaha.

Berikut ini adalah data UMKM yang telah beroleh pembinaan dari tahun 2019 s/d 2021.

**Tabel 3.34**  
**Perbandingan UMKM yang di bina dan pesentase capaian Omsetnya Tahun 2019 - 2021**

Tahun	Jumlah UMKM yang di Bina	Jumlah UMKM yang di Bina dan Persentase Omsetnya	
		Jumlah	%
2019	11640	245	2.26%
2020	12892	335	2.87%
2021	10255	2822	27.05%

Sumber : Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan UKM, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi bantuan modal terhadap UMKM cukup tinggi meski belum mampu memperlihatkan peningkatan usaha bagi UMKM penerima bantuan modal.

Rendahnya alokasi anggaran untuk pembinaan kewirausahaan sehingga pada tahun 2021 jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pembinaan manajemen baru sebanyak 439, memang kalau dibandingkan tahun 2020 ada kenaikan sebanyak 104 Pelaku Usaha mikro yang tersentuh Pembinaan Manajemen.

❖ **Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan**

1. SDM pelaku usaha mengalami peningkatan setelah mengikuti pembinaan manajemen
2. Besarnya minat pelaku usaha mikro dalam mengikuti diklat kewirausahaan yang dilaksanakan.
3. Adanya kemudahan dalam pengurusan ijin usaha
4. Dukungan program dan kegiatan baik melalui APBD Kota Gorontalo maupun APBD Provinsi

❖ **Permasalahan yang dihadapi**



Mempengaruhi tidak tersalurkannya pemberian modal usaha adalah Permedgari nomor 14 tahun 2016 yang tidak lagi membolehkan dana hibah dan bantuan sosial diberikan kepada orang perorangan, organisasi/unit usaha yang berorientasi laba/mencari keuntungan.

#### ❖ Solusi

1. Untuk menjamin pemberian modal usaha kepada pelaku UKM agar tetap berkelanjutan maka Pemerintah Kota Gorontalo mendorong Pihak Perbankan melalui KUR dapat menyalurkan Pinjaman dengan suku bunga yang rendah, disamping Pemerintah Daerah mendorong Lembaga Non Perbankan seperti Lembaga Penyaluran Dana Bergulir KUMKM, Finance, dan Baznas ikut Andil menyalurkan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada para pelaku UMKM.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat.
3. Menerapkan sistem kompetisi bagi 100 pelaku usaha Mikro yang telah di fasilitasi perizinan, pelatihan manajemen usaha, promosi maupun pemasaran, sehingga setelah di adakan evaluasi dan penilaian terhadap kenaikan omset maupun asset dari pelaku usaha maka dari 100 pelaku usaha mikro 50 orang telah di naikan kelasnya menjadi usaha kecil.

Berikut Data Rekapitulasi UMKM yang memperoleh Pembiayaan pada tahun 2019-2021 sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.35**  
**Rekapitulasi UMKM yang memperoleh Pembiayaan**

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima		
		2019	2020	2021
1	KUR	5.643	5.324	
2	Bantuan Modal Pemerintah Provinsi / Pusat	8	8	35
3	Bantuan Modal Pemerintah Kota	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>5.651</b>	<b>5.358</b>	<b>35</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM 2021



Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi bantuan modal terhadap UMKM cukup tinggi meski belum mampu memperlihatkan peningkatan usaha bagi UMKM penerima bantuan modal.

Rendahnya alokasi anggaran untuk pembinaan kewirausahaan sehingga pada tahun 2021 jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pembinaan manajemen baru sebanyak 35 yang menurun dari tahun sebelumnya

#### ❖ **Permasalahan yang dihadapi**

Faktor yang mempengaruhi tidak tersalurkannya pemberian modal usaha adalah Permedgari nomor 14 tahun 2016 yang tidak lagi membolehkan dana hibah dan bantuan sosial diberikan kepada orang perorangan, organisasi/unit usaha yang berorientasi laba/mencari keuntungan.

#### ❖ **Solusi**

1. Untuk menjamin pemberian modal usaha kepada pelaku UKM agar tetap berkelanjutan maka Pemerintah Kota Gorontalo mendorong Pihak Perbankan melalui KUR dapat menyalurkan Pinjaman dengan suku bunga yang rendah, disamping Pemerintah Daerah mendorong Lembaga Non Perbankan seperti Lembaga Penyaluran Dana Bergulir KUMKM, Finance, dan Baznas ikut Andil menyalurkan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada para pelaku UMKM.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha masyarakat.
3. Menerapkan sistem kompetisi bagi 100 pelaku usaha Mikro yang telah di fasilitasi perizinan, pelatihan manajemen usaha, promosi maupun pemasaran, sehingga setelah di adakan evaluasi dan penilaian terhadap kenaikan omset maupun asset dari pelaku usaha maka dari 100 pelaku usaha mikro 50 orang telah di naikkan kelasnya menjadi usaha kecil.

***Misi IV : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber Daya aparatur***



#### 📍 Tujuan 4

**Terwujudnya birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel**

##### ❖ WILAYAH BEBAS KORUPSI

Wilayah Bebas dari Korupsi ( ) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang diberikan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja Penetapan WBK berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Untuk menuju ke WBK telah dilaksanakan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada empat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yakni:

- 1) Rumah Sakit Aloe Saboe dengan nilai 69,03
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan nilai 58,62
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dengan nilai 44.75

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka ketiga Perangkat Daerah tersebut belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sehingga realisasi untuk capaian indikator kinerja tujuan Wilayah Bebas Korupsi belum tercapai.

Beberapa hal yang masih perlu dilakukan untuk menuju WBK antara lain :

1. Membangun komitmen bersama semua pihak yang terkait untuk ikut terlibat dan berperan dalam upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK
2. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah
3. Menerapkan kebijakan Whistle Blowing System
4. Menyusun dan menerapkan kebijakan tentang benturan kepentingan.



a. **Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan diukur dengan 1 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.36**  
**Capaian Kinerja Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3.102	3.202	3.303	103.15%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>103.15%</b>

**1. Nilai Maturitas SPIP**

Nilai maturitas SPIP Kota Gorontalo untuk tahun 2021 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 dengan nilai 3.102. Penjaminan Kualitas tersebut dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Proses Penilaian Mandiri dilaksanakan oleh K/L/D, dengan rincian peran sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM;
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur selaku koordinator PK;
3. Asesor Manajemen selaku pelaksana PM; dan
4. APIP selaku penjamin kualitas atas PM.

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian





mandiri K/L/D dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas Area of Improvement (Aoi). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP. Tahun 2021 Inspektorat Kota Gorontalo melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dilakukan oleh Asesor dengan hasil nilai 3,303. Meskipun dari data tersebut terlihat bahwa nilai Maturitas SPIP Kota Gorontalo di tahun 2021 meningkat, namun hasil Penjaminan Kualitas tersebut hanya merupakan nilai hasil Penjaminan Kualitas dari Inspektorat dan belum dilakukan evaluasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo.

## 2. Indeks Manajemen Risiko Internal (MRI)

Untuk indikator ini belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan pada renstra revisi tahun 2019-2024 sebagai hasil pendampingan BPKP terhadap penyusunan dokumen perencanaan Kota Gorontalo.

## 3. Level Kapabilitas APIP

Penilaian Level kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kota Gorontalo pertama kali dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan hasil penilaian Level 3 Dengan Catatan. Sampai dengan tahun 2021 Inspektorat belum melakukan penilaian kembali baik penilaian mandiri maupun evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

**Tabel 3.37**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD (2024)	2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	3.352	3.303	98,53%
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>					<b>98.53%</b>



Dari data diatas terlihat capaian realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD mencapai realisasi sebesar 98,53% namun hal tersebut masih merupakan nilai sementara karena masih harus menunggu evaluasi yang akan dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo.

❖ **Faktor Penyebab terhambatnya capaian atas target kinerja sasaran antara lain :**

1. Terlambatnya pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas SPIP sehingga tidak dapat dilukan evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo di tahun yang sama.
2. Belum adanya rencana aksi untuk peningkatan nilai maturitas SPIP.
3. Belum terintegrasinya proses pengelolaan risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah.
4. Belum adanya implementasi pengelolaan risiko melalui identifikasi dan analisis risio, penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengkomunikasian risiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian risiko dan implementasi RTP.
5. Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia baik dalam implementasi maupun dalam penilaian maturitas SPIP.
6. Belum dilaksanakan peningkatan mandiri kapabilitas APIP.

❖ **Selain faktor faktor penghambat diatas Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Inspektorat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencapaian indikator sasaran antara lain :**

1. Adanya pembinaan kepada perangkat daerah terkait substansi penilaian risiko dan pengelolaannya, termasuk kepada Bappeda selaku perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, sehingga pengelolaan risiko dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan.
2. Telah merintis pengelolaan risiko, meliputi perumusan risiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP, termasuk penyusunan risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah.



3. APIP telah melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Peningkatan kualitas Program Kerja Tahunan berbasis risiko, dengan menetapkan dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko.

**b. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan diukur dengan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.38**

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Professionalisme dan Manajemen Pemerintah Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	86.57	87,5	89,20	101.94%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	N/A	65	50,71	78,01%
3	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	0.00	3 inovasi	3 inovasi	100,00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>						<b>93.19%</b>

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan di peroleh nilai rata-rata sebesar **93.19%** atau kategori "**Baik**". Dimana Realisasi pada indikator "**Indeks Kepuasan Masyarakat**", diperoleh nilai sebesar 89,20%, dengan persentase capaian sebesar **101.94%** dengan kategori "**sangat baik**" dan telah melampaui target yang ditetapkan. Perolehan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.39

**Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	OPD / Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan
1	Sekretariat DPRD	96.79	A (Sangat Baik)	100	Manual	Sarana dan Prasarana
2	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	96.19	A (Sangat Baik)	176	Manual	Waktu Penyelesaian
3	Kecamatan Kota Timur	95.18	A (Sangat Baik)	265	Manual	Waktu Penyelesaian
4	Dinas Perhubungan	95.00	A (Sangat Baik)	202	Manual	Biaya/Tarif
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.95	A (Sangat Baik)	200	Manual	Waktu Penyelesaian
6	RSUD. Aloe Saboe	93.61	A (Sangat Baik)	200	Manual	Waktu Penyelesaian
7	Kecamatan Duingingi	92.22	A (Sangat Baik)	150	Manual	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
8	Kecamatan Kota Barat	92.72	A (Sangat Baik)	150	Manual	Waktu Penyelesaian
9	Kecamatan Kota Selatan	91.57	A (Sangat Baik)	280	Manual	1.) Perilaku Pelaksana 2.) Waktu Penyelesaian 3.) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 4.) Sarana dan Prasarana
10	Kecamatan Kota Tengah	91.18	A (Sangat Baik)	275	Manual	Waktu Penyelesaian
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	91.00	A (Sangat Baik)	120	Manual	Persyaratan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.22	A (Sangat Baik)	160	Manual	Waktu Penyelesaian
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	90.19	A (Sangat Baik)	250	Aplikasi dan Manual	Waktu Penyelesaian
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	90.16	A (Sangat Baik)	200	Manual	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	90.10	A (Sangat Baik)	382	Manual	Waktu Penyelesaian
16	Kecamatan Sipatana	89.81	A (Sangat Baik)	350	Manual	Waktu Penyelesaian
17	Inpektorat	89.70	A (Sangat Baik)	163	Manual	Waktu Penyelesaian
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	89.55	A (Sangat Baik)	170	Manual	Perilaku Pelaksana
19	Satpol - PP	89.47	A (Sangat Baik)	250	Manual	Sarana dan Prasarana



No	OPD / Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	88.84	A (Sangat Baik)	150	Manual	Persyaratan
21	Kecamatan Dumbo Raya	88.77	A (Sangat Baik)	175	Manual	Waktu Penyelesaian
22	Kecamatan Kota Utara	88.65	A (Sangat Baik)	220	Manual	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
23	Dinas Lingkungan Hidup	88.52	A (Sangat Baik)	150	Manual	Persyaratan
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88.45	A (Sangat Baik)	150	Manual	Waktu Penyelesaian
25	Dinas Pangan	88.41	A (Sangat Baik)	100	Manual	Waktu Penyelesaian
26	Dinas Pendidikan	88.32	A (Sangat Baik)	215	Manual	Waktu Penyelesaian
27	Badan Keuangan	88.21	B (Baik)	300	Manual	1.) Biaya/Tarif 2.) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	87.75	B (Baik)	175	Manual	Waktu Penyelesaian
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.32	B (Baik)	503	Manual	Waktu Penyelesaian
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	85.05	B (Baik)	100	Manual	Sarana dan Prasarana
31	RSUD. Otanaha	83.96	B (Baik)	220	Manual	Waktu Penyelesaian
32	Sekretariat Daerah	83.81	B (Baik)	275	Manual	Waktu Penyelesaian
33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83.58	B (Baik)	150	Manual	1.) Persyaratan 2.) Waktu Penyelesaian
34	Kecamatan Hulonthalangi	83.22	B (Baik)	196	Manual	Sarana dan Prasarana
35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	83.01	B (Baik)	160	Manual	Waktu Penyelesaian
36	Dinas Kesehatan	82.67	B (Baik)	500	Manual	Waktu Penyelesaian
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.41	B (Baik)	419	Manual	Waktu Penyelesaian
	<b>Rata-rata</b>	<b>89.20</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>			

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 37 (tiga puluh tujuh) Perangkat Daerah di Kota Gorontalo, sebanyak 26 (dua puluh enam) unit atau 70.27% memperoleh mutu pelayanan SANGAT BAIK (A) dan 11 (sebelas) unit atau 29.73% memperoleh mutu pelayanan BAIK (B). Capaian mutu pelayanan lebih



renci dijabarkan dalam Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 masing-masing Perangkat Daerah. Perbandingan perolehan nilai Indeks Kepuasan Pelayanan tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.36 sebagai berikut :

**Tabel 3.40**  
**Perbandingan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	OPD / Unit Pelayanan Publik	Tahun 2020		Tahun 2021		Ket Naik (+) Turun (-)
		Nilai IKM	Kategori	Nilai IKM	Kategori	
1	Sekretariat DPRD	90.83	Sangat Baik	96.79	A (Sangat Baik)	5.96
2	Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat	84.81	Baik	96.19	A (Sangat Baik)	11.38
3	Kecamatan Kota Timur	93.68	Sangat Baik	95.18	A (Sangat Baik)	1.5
4	Dinas Perhubungan	94.99	Sangat Baik	95.00	A (Sangat Baik)	0.01
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.87	Sangat Baik	94.95	A (Sangat Baik)	0.08
6	RSUD. Aloei Saboe	84.03	Baik	93.61	A (Sangat Baik)	9.58
7	Kecamatan Dungingi	91.09	Sangat Baik	92.22	A (Sangat Baik)	1.13
8	Kecamatan Kota Barat	84.94	Baik	92.72	A (Sangat Baik)	7.78
9	Kecamatan Kota Selatan	90.73	Sangat Baik	91.57	A (Sangat Baik)	0.84
10	Kecamatan Kota Tengah	91.20	Sangat Baik	91.18	A (Sangat Baik)	-0.02
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84.66	Baik	91.00	A (Sangat Baik)	6.34
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.07	Sangat Baik	90.22	A (Sangat Baik)	1.15
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	89.11	Sangat Baik	90.19	A (Sangat Baik)	1.08
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	81.35	Baik	90.16	A (Sangat Baik)	8.81
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM	85.76	Baik	90.10	A (Sangat Baik)	4.34
16	Kecamatan Sibatana	89.62	Sangat Baik	89.81	A (Sangat Baik)	0.19
17	Inpektorat	89.66	Sangat Baik	89.70	A (Sangat Baik)	0.04
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	89.13	Sangat Baik	89.55	A (Sangat Baik)	0.42



19	Satpol - PP	94.74	Sangat Baik	89.47	A (Sangat Baik)	-5.27
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	86.43	Baik	88.84	A (Sangat Baik)	2.41
21	Kecamatan Dumbo Raya	79.47	Baik	88.77	A (Sangat Baik)	9.3
22	Kecamatan Kota Utara	89.77	Sangat Baik	88.65	A (Sangat Baik)	-1.12
23	Dinas Lingkungan Hidup	92.23	Sangat Baik	88.52	A (Sangat Baik)	-3.71
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84.39	Baik	88.45	A (Sangat Baik)	4.06
25	Dinas Pangan	87.51	Baik	88.41	A (Sangat Baik)	0.9
26	Dinas Pendidikan	88.32	Sangat Baik	88.32	A (Sangat Baik)	0
27	Badan Keuangan	83.21	Baik	88.21	B (Baik)	5
28	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandiana	89.56	Sangat Baik	87.75	B (Baik)	-1.81
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.13	Baik	87.32	B (Baik)	0.19
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84.67	Baik	85.05	B (Baik)	0.38
31	RSUD. Otanaha	83.45	Baik	83.96	B (Baik)	0.51
32	Sekretariat Daerah	82.93	Baik	83.81	B (Baik)	0.88
33	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82.25	Baik	83.58	B (Baik)	1.33
34	Kecamatan Hulonthalangi	82.82	Baik	83.22	B (Baik)	0.4
35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	88.86	Sangat Baik	83.01	B (Baik)	-5.85
36	Dinas Kesehatan	81.57	Baik	82.67	B (Baik)	1.1
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	81.49	Baik	82.41	B (Baik)	0.92
<b>Rata-rata</b>		<b>87.31</b>	<b>Baik</b>	<b>89.20</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>	

Sumber Data : *Bagian Organisasi Tahun 2021 (diolah)*

Beberapa langkah strategis dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 9 (sembilan) prinsip pelayanan adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.



2. *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur*, melaksanakan review Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan dan bidang tugas.
3. *Waktu Penyelesaian*, memanfaatkan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan dan menambah personil/petugas pelayanan.
4. *Biaya/Tarif*, melaksanakan sosialisasi tentang biaya/tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.
5. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.
6. *Kompetensi Pelaksana*, mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan teknis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan dan Peta Jabatan.
7. *Perilaku Pelaksana*, memberikan bimbingan/arahan kepada pegawai secara rutin.
8. *Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan*, melaksanakan optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membentuk tim penanganan pengaduan.
9. *Sarana dan Prasarana*, melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2021 Kinerja pelayanan publik Pemerintah Kota Gorontalo juga telah dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi namun realisasi atas capaian kinerja terhadap pelayanan publik tersebut masih dalam proses evaluasi. Terkait dengan kinerja pelayanan publik Kota Gorontalo dapat disajikan data pada tahun 2021 dimana lokus penilaiannya terdiri dari dua perangkat daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penilaian berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Fokus penilaian terdiri dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Hasil penilaian terhadap dua perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut :





**Tabel 3.42**  
**Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah	Indeks	Kategori	Makna
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,23	A -	Sangat baik
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,98	B	Baik

Sumber data : : Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB Tahun 2021

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dilaksanakan lewat Penginputan pada aplikasi *Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)* Badan Kepegawaian Negara oleh seluruh Operator Kepegawaian yang ada di OPD se-Kota Gorontalo dan akan dinilai oleh Tim yang telah dibentuk oleh Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara RI. Standar Profesionalitas ASN terdiri atas empat dimensi yang merupakan elemen pokok sebagai prasyarat dasar seorang pegawai ASN dapat menjadi professional, penjelasan dari standar professional ASN tersebut dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.43**  
**Dimensi Pengukuran Standar Profesional ASN**

Standar Profesional	Dimensi Penilaian	Deskripsi	Indikator yang digunakan
1	Kualifikasi	Dimensi ini menunjukkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.	Data/Riwayat tingkat atau jenjang pendidikan formal yang dicapai oleh PNS - Jenjang Doktor atau Strata 3 (S3) - Jenjang Master/Magister atau Strata 2 (S2) - Jenjang Sarjana (S1) Diploma 4 (D4) - Jenjang Diploma 3 (D3) - Jenjang Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat - Dibawah SLTA



Standar Profesional	Dimensi Penilaian	Deskripsi	Indikator yang digunakan
2	Kompetensi	Dimensi ini menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi bersinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja.	Data/riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti terdiri atas :
			- Diklat Kepemimpinan (bagi pejabat structural)
			- Diklat fungsional (bagi pejabat fungsional)
			- Diklat Teknis (bagi pejabat structural, fungsional dan Pelaksana)
- Seminar/workshop/magang/kursus/sejenis (bagi pejabat struktural fungsional dan pelaksana)			
3	Kinerja	Dimensi ini menggambarkan pencapaian sasaran kinerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS	Data/riwayat hasil penilaian kinerja terdiri atas :
			- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- Perilaku Kerja Pegawai (PKP)			
4	Disiplin	Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan	Data/Riwayat pegawai yang terkena hukuman disiplin, terdiri atas :
			- Hukuman disiplin ringan
			- Hukuman disiplin sedang, dan
- Hukuman disiplin berat			

Sumber Data : Badan Kepegawaian RI



**Tabel 3.44**  
**Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kota Gorontalo**

Nama Instansi	Jumlah PNS	Jumlah Responden	Persentase	Dimensi				Nilai
				Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Pemerintah Kota Gorontalo	4014	3888	97%	13,0	11.5	21.69	5.0	50,71

Sumber Data : BKPP Kota Gorontalo Tahun 2021

**Tabel 3.45**  
**Perbandingan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kota Se-  
Provinsi Gorontalo**

NO	INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	NILAI	KATEGORI
1	Pemerintah Kab. Bone Bolango	3.698	47.91	Sangat Rendah
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	4.926	52.34	Sangat Rendah
3	Pemerintah Kota Gorontalo	3.922	50.71	Sangat Rendah
4	Pemerintah Provinsi Gorontalo	5.298	29.38	Sangat Rendah
5	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2.395	33.80	Sangat Rendah
6	Pemerintah Kab. Pohuwato	3.356	31.76	Sangat Rendah
7	Pemerintah Kab. Boalemo	3.037	43.31	Sangat Rendah

Sumber Data : BKPP Kota Gorontalo Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Gorontalo memperoleh nilai standar profesionalitas ASN terbaik kedua tingkat kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo, nilai tertinggi dari 4 dimensi pengukuran adalah dimensi pengukuran “kinerja”, karena hampir seluruh pegawai diberikan nilai kerja yang mendekati sempurna dalam Kategori “Baik”. Hal ini memang sangat terkait dengan standarisasi khususnya pada substansi kinerja dan bagaimana model cascading dan alignment sampai ke tingkat bawah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,



kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dilaksanakan lewat Penginputan pada aplikasi *Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)* Badan Kepegawaian Negara oleh seluruh Operator Kepegawaian yang ada di OPD se-Kota Gorontalo dan akan dinilai oleh Tim yang telah dibentuk oleh Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara RI. Standar Profesionalitas ASN terdiri atas empat dimensi yang merupakan elemen pokok sebagai prasyarat dasar seorang pegawai ASN dapat menjadi profesional,

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil Negara dapat diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar. Seperti tersebut dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (1) setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja kompetensi PNS yang bersangkutan ayat (2) Hak dan Kesempatan untuk mengikuti pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun. Untuk itu dalam pencapaian indikator sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo menuangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian untuk indikator ini di gambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.46**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau**  
**Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi pada Badan**  
**Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang memperoleh pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	Persen	12,40	15,4	124%

Sumber Data : BKPP Kota Gorontalo Tahun 2021



Capaian indikator kinerja ini adalah 124% atau sangat baik. Pada tahun 2021 ASN dari 4014 ASN terdapat 981 orang yang memperoleh pengembangan kompetensi dan 622 orang yang memperoleh pengembangan kompetensi 20 JP atau 15,4% dibandingkan pada tahun 2020 ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi dan memperoleh 20 JP adalah sebanyak 205 orang dari 4017 ASN atau 5%, walaupun dilihat dari persentase capaian tahun 2021 hanya sedikit dibanding tahun 2020 akan tetapi jika dilihat dari jumlah ASN pada tahun 2021 jauh lebih banyak seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.47

**JUMLAH ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANG KOMPETENSI  
JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN  
2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	SATUAN	JML ASN	JML ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KOMPETENSI	JLM ASN YANG MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KOMPETENSI MINIMAL 20 JP
1	BKPP KOTA GORONTALO	ASN	42	38	10
2	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO	ASN	120	29	6
3	BADAN KESBANGPOL KOTA GORONTALO	ASN	22	16	13
4	BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO	ASN	75	71	48
5	BLUD PROF. Dr. H. ALOEI SABOE	ASN	449	48	28
6	BPBD KOTA GORONTALO	ASN	32	10	7
7	BAPPELITBANG KOTA GORONTALO	ASN	38	15	3
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA GORONTALO	ASN	20	7	3
9	DKPP KOTA GORONTALO	ASN	83	32	20



10	DINAS DUKCAPIL KOTA GORONTALO	ASN	25	5	4
11	INSPEKTORAT KOTA GORONTALO	ASN	61	64	64
12	DINAS KOMINFO KOTA GORONTALO	ASN	27	12	6
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ASN	43	11	9
14	DINAS PANGAN KOTA GORONTALO	ASN	24	6	4
15	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA GORONTALO	ASN	40	6	5
16	DPMPTSP KOTA GORONTALO	ASN	34	23	11
17	DPPKBP3A KOTA GORONTALO	ASN	35	13	5
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA GORONTALO	ASN	34	6	5
19	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GORONTALO	ASN	31	6	3
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GORONTALO	ASN	27	16	10
21	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO	ASN	35	2	1
22	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA GORONTALO	ASN	36	11	5
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO	ASN	69	23	12
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GORONTALO	ASN	71	4	2
25	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	ASN	27	18	
26	DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO	ASN	1510	250	173
27	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO	ASN	574	189	131



28	KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO	ASN	45	5	2
29	KECAMATAN KOTA SELATAN KOTA GORONTALO	ASN	48	4	4
30	KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO	ASN	44	7	
31	KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO	ASN	53	3	6
32	KECAMATAN KOTA BARAT KOTA GORONTALO	ASN	57	9	2
33	KECAMATAN KOTA UTARA	ASN	45	4	3
34	KECAMATAN SIPATANA	ASN	43	4	5
35	KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO	ASN	51	7	4
36	KECAMATAN HULONTHALANGI KOTA GORONTALO	ASN	44	7	8
<b>TOTAL</b>			4014	981	622

Sumber Data : BKPP Kota Gorontalo Tahun 2021

Faktor-faktor menyebabkan keberhasilan dari indikator kinerja *Indeks Profesionalitas ASN* antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Peningkatan kompetensi aparatur (berupa Diklat teknis/Bimtek) sesuai tupoksi
- Melaksanakan kegiatan Peningkatan kompetensi yang diikuti oleh ASN setiap tahunnya.
- Merencanakan kebutuhan diklat yang penunjukan pesertanya berdasarkan analisis kebutuhan kompetensi yang ingin ditingkatkan
- Telah melakukan pemetaan terhadap standar kompetensi jabatan.

Untuk itu, beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator *Indeks Profesionalitas ASN* dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Menyusun analisis kebutuhan Diklat
- Menetapkan kebijakan diklat satu pintu
- Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja



- Menciptakan kerja sama yang baik antara peserta diklat, panitia penyelenggara dan widyaiswara.
- Meningkatkan pendidikan formal PNS melalui pemberian tugas belajar dan ijin belajar.

Tabel 3.48

## Capaian Kinerja Sasaran Inovasi Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2019	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	0.00	3 inovasi	3 inovasi	100,00%

Realisasi pada indikator **“Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah”**, diperoleh nilai sebesar 100,00% atau sebanyak tiga inovasi yang diterapkan di daerah dengan kategori **“baik”** dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi atas kinerja ini tidak tercapai sebagaimana target yang ditetapkan dengan nilai persentasi di angka 0,00%. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bentuk dan kriteria inovasi daerah sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah antara lain :

- ❖ Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- ❖ Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- ❖ Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.





Adapun inovasi di bidang pelayanan publik, Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2021 telah melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah serta mengusulkannya namun dari beberapa usulan tersebut tidak ada yang lolos dalam kompetensi inovasi pelayanan publik Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2021 ada 3 inovasi yang diusulkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, masing-masing adalah :

1. **LASIMPEBE (Layanan Sistem Pengaduan Berbasis Online)** inovasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo

Inovasi Sistem Pengaduan Berbasis Elektronik (Lasimpebe) adalah suatu sistem yang digunakan dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan data penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak sampai dengan evaluasi terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan maksud dan tujuan sebagai berikut 1) Sinkronisasi data kekerasan baik yang dilaporkan di P2TP2A Kota Gorontalo maupun yang dilaporkan di UPPA Polres Gorontalo Kota; 2) Memudahkan masyarakat untuk melaporkan apabila ada kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap anak didalam atau disekitar lingkungannya; 3) Sebagai bahan evaluasi atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A, sebab dalam fitur layanannya memuat jumlah kasus yang tertangani sampai dengan selesai; dan 4) Sebagai bahan evaluasi terhadap program/kegiatan yang menasar perempuan dan anak. Selama 3 (tiga) tahun penggunaan Aplikasi Lasimpebe ini sangat membantu didalam proses pendampingan dan pemetaan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab dengan adanya aplikasi ini memudahkan para pihak (P2TP2A, UPPA Polres Gorontalo Kota dan Kecamatan) untuk saling berkoordinasi, memantau perkembangan kasus kekerasan.

2. **OTSGo (One Tax Service Gorontalo Kota)**

**One Tax Service Gorontalo Kota** adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang di berikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal mempermudah dalam membayar pajak daerah yang menjadi kewajiban setiap masyarakat yang merupakan wajib pajak daerah. Wajib pajak itu sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,



pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Keuangan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pemungutan pajak daerah atau pendapatan asli daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel dan lain-lain. Dalam menjalankan tupoksinya, Pemerintah Kota Gorontalo mengalami permasalahan di antaranya yaitu tunggakan pajak. Pemerintah Kota Gorontalo khususnya Badan Keuangan merasa sangat perlu untuk menerapkan teknologi informasi untuk proses pelayanan pajak dengan merancang aplikasi One Tax Service Gorontalo Kota (OTSGo) yang merupakan aplikasi layanan pajak satu aplikasi yang dirancang pada platform mobile dengan sistem operasi Android. Aplikasi ini akan memudahkan semua wajib pajak baik instansi maupun individu dalam mengetahui informasi objek pajak yang dimiliki, informasi besaran tagihan pajak atas objek pajak yang dimiliki, serta dapat melakukan pembayaran iuran pajak langsung dari handphone kapan dan dimanapun. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Bank dan Merchant pembayaran seperti Link Aja, Mobile banking, Kantor Pos serta dengan metode QRIS (Quick Respon Indonesia Standar) yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan dilakukannya pembayaran pajak secara digitasi akan mengurangi aktivitas datang langsung melakukan pembayaran ke kantor, sehingga dapat membantu mengontrol penyebaran virus Covid 19. Dengan adanya OTSGo (One Tax Service Gorontalo Kota) ini di harapkan semua permasalahan itu segera dapat di atasi sehingga tunggakan pajak yang setiap tahunnya bertambah dapat di kurangi, karena semua sudah menggunakan aplikasi yang dengan mendownload aplikasi tersebut semua permasalahan baik itu lokasi proses serta kebocoran dapat di minimalisir dan bahkan dapat di atasi. Setiap tahunnya kebutuhan Pemerintah Kota Gorontalo dalam membangun Daerah dapat di realisasikan karena dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Daerah yang merupakan tujuan utama dengan adanya OTSGo ini. Dan dengan OTSGo ini masyarakat sebagai wajib pajak perorangan ataupun usaha dapat memenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak sehingga penerimaan daerah dapat tercapai sesuai yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga roda pemerintahan



bisa berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintah sudah sesuai dengan apa yang sudah di canangkan.

### **3. PENINGKATAN KEMAMPUAN SANSILK (SANITASI DAN LINTAS SEKTOR) DALAM OPTIMALISASI PENGAWASAN IRTP (INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN) DI KOTA GORONTALO**

Program Inovasi Peningkatan Kemampuan Sanitasi Lintas Sektor (Sansilk) dalam Optimalisasi Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) secara tematik menyatukan berbagai unsur permasalahan dimulai dari kurangnya jumlah sanitarian untuk mengawasi Industri Rumah Tangga yang ada di Kota Gorontalo sehingga merangkul pihak kelurahan untuk bekerja sama, kurangnya pengetahuan para pengelola Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), pengawasan yang belum maksimal, sehingga hal ini berpengaruh terhadap keluaran Industri Rumah Tangga Yang baik dan bermutu. Program Inovasi ini merupakan kolaborasi dan perpaduan Tim Tekhnis lapangan yang handal, yang terlebih dahulu dibekali ilmu untuk pengawasan dan cara pengurusan izin Industri rumah tangga pangan, sebagai sarana utama dilapangan dalam akuntabilitas data riil PIRT, sebagai tim handal dalam penyebaran pengetahuan dan informasi penting tentang pangan yang memenuhi syarat kesehatan, sebagai tim dalam memotivasi dan mensupport masyarakat dalam meningkatkan produk IRTP yang higienis, bebas dari kontaminasi dan sumber penularan melalui upaya penerapan hygiene sanitasi dalam pengelolaan produk pangan yang baik, sebagai tim yang secara tidak langsung dapat membantu memacu dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kemampuan SANSILK dalam pengawasan IRTP melalui Pembentukan Tim SANSILK dan edukasi yang dilakukan sangatlah mempercepat proses pemantauan dan pengawasan dilapangan. Melalui perpanjangan tangan Tim yang dibentuk dan telah dibekali dengan ilmu tentang Cara produksi pangan yang baik, keamanan pangan serta materi2 lain yang dipersyaratkan untuk keamanan pangan secara cepat dapat tersampaikan kepada masyarakat selaku pengelola IRTP yang tersebar disetiap disetiap wilayah Kecamatan di Wilayah Kota Gorontalo. Hal ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang pula terutama dalam hal pengurusan perizinan Industri Rumah Tangga Yang baik serta



mempercepat penerbitan Izin Industri Rumah Tangga pangan dan pengurusan Proses Halal.

**Tabel 3.49**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	89	89,20	100.22%
2	Indeks Profesionalitas ASN	Persen	61	55,7	91.31%
3	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	10	3	30,00%
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>					<b>66.66%</b>

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka diperoleh persentase capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97,90%, indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 91.31%, dan Indikator Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 12,50% dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir tahun RPJMD sebesar **66,66 %** dengan Kategori “**Cukup Baik**”.

#### ❖ Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021

**Tabel 3.50**  
**Indeks Birokrasi Reformasi Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,00	62,95	99,92%



Nilai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi telah dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB dengan nilai **62,95**. Perolehan nilai ini jika sandingkan dengan target RPJMD maka mencapai hasil **99,92%** kategori **Sangat Baik**. Namun disisi lain jika bandingkan dari bobot nilai keseluruhan yaitu 100,00 maka nilai yang masih di kategorikan **Kurang Baik**. Tujuan evaluasi Reformasi Birokrasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dalam mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan secara prima, berikut rincian pengukuran evaluasi indeks reformasi birokrasi Kota Gorontalo

**Tabel 3.51**  
**Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Kota Gorontalo**  
**Tahun 2021**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Capaian
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	I. Pemenuhan	20.00	14.02
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10.00	1.85
	III. Reform	30.00	12.78
	<b>Total Pengungkit</b>	<b>60.00</b>	<b>28.65</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.54
2	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.33
3	Pemerintah Bersih dan Bebas KKN	10.00	8.43
4	Kinerja Organisasi	10.00	7.96
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40.00</b>	<b>32.26</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100.00</b>	<b>62.95</b>

Penyebab lainnya adalah Tampilan Kertas kerja Lembar evaluasi pada tahun 2021 ada penambahan komponen penilaian yang mempengaruhi capaian kinerja. Komponen tersebut antara lain :

- 1) Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip;
- 2) indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Indeks pengelolaan Keuangan;
- 4) Indeks Kualitas Pengelolaan Aset;
- 5) Indeks Merit System;



- 6) Indeks ASN Profesional;
- 7) Indeks Kualitas Perencanaan;
- 8) Indeks Maturitas SPIP;
- 9) Indeks Kapabilitas APIP; dan
- 10) Indeks Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan nilai reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, telah dilakukan berbagai upaya, sebagaimana Rekomendasi Tim evaluasi KemenPAN dan RB antara lain:

- ❖ *Pada Aspek pemenuhan komponen Pengungkit Mandatory level OPD dilaksanakan disertai bukti dukungannya*, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan sosialisasi terkait pengisian Lembar kerja evaluasi sampai di level OPD.
- ❖ *Pada Rencana kerja RB yang belum disusun komprehensif*, Tim RB Kota Gorontalo melakukan pengkajian terhadap dokumen roadmap yang telah disusun dengan menganalisa rencana target pencapaian RB Pemerintah Kota Gorontalo yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan.
- ❖ *Untuk Agen perubahan dan perannya, internalisasi atas Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dilaksanakan* Tim RB Kota Gorontalo telah merekomendasikan kepada unit teknis pelaksana untuk segera membuat keijakan terkait agen perubahan dan teknis pelaksanaan dan Kebijakan terkait Agen Perubahan sementara dalam penyusunan.
- ❖ *Pada aspek penilaian Belum mengungkapkan apa kekurangan atau hambatan yang dihadapi*, Tim RB Kota Gorontalo telah berupaya memetakan kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang kemudian mencari solusi atas permasalahannya.
- ❖ *Pada aspek Belum terbentuknya proses bisnis sehingga belum bisa mendapatkan gambaran yang ideal mengenai struktur organisasi yang seharusnya yang mengacu pada kinerja utama* Tim RB Kota Gorontalo telah merekomendasi untuk segera melakukan penyusunan Peta Proses Bisnis dan pada tahun 2021. Unit teknis pelaksana kegiatan dalam hal ini Bagian Organisasi telah Melakukan Sosialisasi terkait penyusunan peta proses bisnis dan sementara memetakan Peta proses bisnis dilevel Pemerintah Kota yang Mengacu pada cascading dan dokumen perencanaan Daerah.



- ❖ *Identifikasi terkait deregulasi kebijakan*, telah dilakukan pemetaan terhadap kebijakan terkait produk hukum daerah
- ❖ *Penetapan Kinerja Individu yg masih belum mengacu pada kinerja utama organisasi, evaluasi kelembagaan*, telah dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi sampai dengan level yang paling bawah
- ❖ *Pengawasan yang belum dilaksanakan (monev pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, spip, wbs, sistem pengaduan)*, Pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan kebijakan terkait benturan kepentingan dan sementara melakukan sosialisasi ditingkat OPD.
- ❖ *Standar pelayanan dan inovasi2 yg memudahkan pelayanan*. Pemerintah Kota Gorontalo sudah melakukan pelayanan publik dengan baik dengan telah menyusun standar pelayanan, SOP pelayanan dan pengaduan pelayanan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan melalui berbagai media. Inovasi pelayanan juga dilakukan dengan membuat program KTP secara *online* yang bisa kelahiran pada yang sama dengan saat ada kelahiran; keuangan, Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan pembenahan yang signifikan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- ❖ *Untuk aspek reform per area mengikuti hasil-hasil dari aspek pemenuhan mandatory* hal yang telah dilakukan adalah adanya perubahan terhadap penilaian kinerja Aparatur Kota Gorontalo dimana setiap OPD melaporkan penilaian kinerjanya melalui aplikasi E-LAPKIN.

Tujuan daerah ***Terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel*** dengan indikator kinerja ***indeks Reformasi Birokrasi*** ditunjang oleh sasaran strategis pembangunan Kota Gorontalo sebagai berikut :

**a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan diukur dengan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut:



**Tabel 3.52**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas**  
**Kinerja Pemerintahan**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target	Tahun 2021	
					Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	100,00%
2	Nilai LPPD	Nilai	3.4671	3.4211	n/a	-
3	Nilai AKIP	Nilai	B (65.12)	BB (70)	65,98	101.32%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>100.66</b>

Data yang disajikan pada sasaran strategis ini merupakan data capaian tahun 2020 dengan pembagiannya target pada tahun 2021. Adapun data capaian kinerja per indikator yang diperjanjikan masih dalam proses evaluasi. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan **Opini Laporan Keuangan** dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dari hasil olah data dapat dilihat bahwa kinerja pada indikator tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan capaian sebesar **100%** dengan kategori kinerja **“Sangat baik”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka capaian tersebut sangat berhasil sama dengan tahun 2019.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Gorontalo dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.53**  
**Opini BPK Atas Laporan Keuangan**

No	Tahun	Opini	Keterangan
1	2019	WTP	Hasil Penilaian tahun 2020
2	2020	WTP	Hasil Penilaian tahun 2021
3	2021		<b>Dalam Proses Evaluasi</b>

Sumber Data : Badan Keuangan 2021 (Diolah)





Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019 sampai dengan 2021 laporan keuangan Kota Gorontalo memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Peningkatan capaian kinerja Tahun 2021, menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Gorontalo terbilang berhasil, dan mampu dalam mempertahankan opini WTP sehingga sasaran atas indikator kinerja ini dapat tercapai. Selain itu Pemerintah Kota Gorontalo adalah satu-satunya daerah di Gorontalo yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kumalahadi yang mengindikasikan bahwa LKPD pemerintah Kota Gorontalo mendapat perhatian khusus. Namun demikian Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen akan terus memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

Penunjang keberhasilan capaian kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo ini diupayakan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

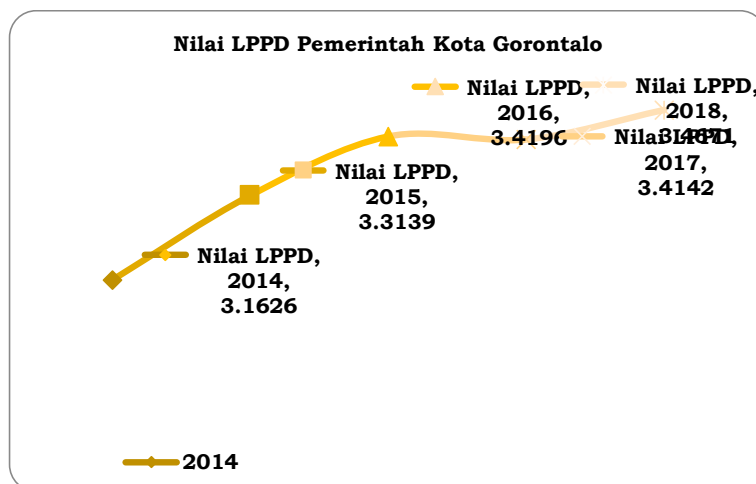
- ❖ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian Anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ❖ Mengaplikasikan SIMDA pengelolaan keuangan yang terintegrasi disemua OPD;
- ❖ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ❖ Memberikan penguatan terhadap seluruh perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkait pengelolaan keuangan daerah.
- ❖ Pencegahan terhadap pengelolaan keuangan agar kekeliruan dapat diminimalisir.
- ❖ Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- ❖ Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Realisasi kinerja pada indikator kinerja “**Nilai LPPD**” ditahun 2018, yang di umumkan pada tahun 2020 diperoleh Nilai sebesar **(Score) 3.4671** dengan status kinerja “**Sangat Tinggi**”. Jika nilai LPPD ini dibandingkan dengan target pada tahun 2021 maka persentase capaian kinerja atas indikator ini adalah **101,34%** dengan Kategori “**sangat baik**”. Capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,0529 poin, jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2017.



Dalam mempertahankan pencapaian ini, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah dengan terus melakukan koordinasi antar instansi terkait guna pemenuhan kewajiban dan bukti dukung Penyelenggaraan Pemerintah. Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo, sebagaimana grafik berikut :

**Grafik 3.8**



Sumber Data: Hasil LPPD Kementerian Dalam Negeri

Pada Tahun 2020 tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan predikat B dengan nilai 65,98. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian tahun 2020 lebih baik, karena predikatnya naik



Sebesar 0,86 poin. Sementara itu untuk “*Nilai AKIP*” tahun 2021 masih dalam proses evaluasi, namun apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2021 maka diperoleh persentase capaian sebesar **93,03%** dengan kategori “**Sangat Baik**”.

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kota Gorontalo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.54**  
**Hasil Evaluasi AKIP Kota Gorontalo**

No	ASPEK YANG DI EVALUASI	PROPORSI (BOBOT)	TAHUN 2018	TAHUN 2019	Tahun 2020
1	Perencanaan	35	21,97	22,19	22,23
2	Pengukuran Kinerja	20	14,38	14,41	14,46
3	Pelaporan Kinerja	15	10,53	10,53	10,67
4	Evaluasi Internal	10	5,61	5,60	5,76
5	Capaian Kinerja	20	12,38	12,39	12,60
Nilai Hasil Evaluasi		100%	64,87	65,12	65,98
<b>Predikat / Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Dari data tersebut diatas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen evaluasi internal menempati posisi kinerja terendah sebesar 5,60% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan sebesar 22,23%.

Berikut adalah beberapa catatan tentang kualitas implementasi SAKIP Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2021 yang disampaikan oleh Tim Evaluator SAKIP KEMENPANRB sebagai bahan evaluasi secara keseluruhan, catatannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Gorontalo harus memastikan definisi kinerja dan indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra OPD, Renja, dan PK
2. Pemerintah Kota Gorontalo Menyempurnakan cascading sampai pada tingkat individu pegawai untuk memastikan keselarasan ukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian reward dan punishment
3. Sasaran Memastikan tersedianya ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan hingga individu secara yang spesifik, relevan dan terukur, serta



memastikan SKP disusun menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil pada PK

4. Pemerintah Memastikan diterapkan anggaran berbasis kinerja diseluruh perangkat daerah
5. Mengembangkan aplikasi SAKIP secara integrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-sakip daerah
6. Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat, namun belum menggambarkan kondisi penerapan SAKIP secara obyektif sesuai yang ada dilapangan. Akibatnya hasil evaluasi belum mampu memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, tingkat pemahaman evaluator terhadap SAKIP yang belum baik belum mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal dan menerapkan *professional judgements* secara tepat.

Berdasarkan uraian tersebut maka rekomendasi yang disarankan oleh TIM Evaluator KEMENPAN dan RB adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja diLingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun – tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Gorontalo juga dapat membuat rencana aksi untuk memantau progress tindak lanjut tahun 2021.
2. Mereviu kembali dokumen perencanaan baik level pemerintah daerah maupun level OPD agar tetap memperhatikan kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta mekanisme cascade kinerja
3. Mekanisme kualitas pohon kinerja dengan menggunakan *logic model* yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan dan menjabarkan kinerja (*cascading*) setiap OPD sampai level individu. Selain itu, pohon kinerja yang disusun juga sebaiknya disesuaikan dengan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Pohon kinerja selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan IKU OPD.



4. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (*e-performance based organization*) yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja serta sebagai media dalam melakukan revaluasi capaian kinerja secara berkala.
5. Menyempurnakan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo maupun perangkat daerah dengan menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai, menyajikan perbandingan realisasi akumulasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah serta memanfaatkan informasi kinerja sebagai salah satu dalam pengambilan keputusan.
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja oleh inspektorat kepada OPD agar hasil evaluasi dapat menggambarkan secara obyektif penerapan SAKIP sehingga saran dan rekomendasi yang diberikan dapat membantu OPD dalam meningkatkan penerapan SAKIP. Selain itu Bappeda dan para penanggungjawab program juga sebaiknya dapat meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Dalam upaya mencapai target akuntabilitas kinerja tahun 2021, terdapat kendala-kendala yang harus diatasi. Pertama, kurangnya komitmen Pimpinan secara berjenjang dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja.. Kedua, belum terlaksananya proses pengintegrasian aplikasi perencanaan dan penganggaran ke dalam aplikasi e-LAKIP. Ketiga, kurangnya pemahaman SDM dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Untuk itu Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 telah berupaya melakukan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja nya antara lain :

1. Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan atas manajemen kinerja dengan membuat rencana aksi tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun 2019.
2. Melakukan evaluasi dokumen perencanaan pemerintah daerah Kota Gorontalo sampai di level OPD dengan membagi proses evaluasi dokumen perencanaan sampai pelaporan dimasing-masing Sub Koordinasi Wilayah
3. Membuat *cascading* kinerja dengan menggunakan pendekatan proses bisnis.
4. Terus berupaya mengembangkan aplikasi teknologi informasi *e-LAKIP* yang terintegrasi dengan informasi keuangan



5. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo secara baik
6. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat Kota Gorontalo dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Bimtek dan pelatihan terkait Perencanaan Kinerja.

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan terhadap kondisi akhir tahun RPJMD, dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.55**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	n/a	-
2	Nilai LPPD	Nilai	3.5000	n/a	-
3	Nilai AKIP	Nilai	(A) 87	n/a	-
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>					-

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Gorontalo terhadap kondisi akhir tahun RPJMD diharapkan bisa tercapai sebagaimana capaian pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dari hasil capaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kota Gorontalo akan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.

**Misi V : Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya**

**🌀 Tujuan 5**

**Terwujudnya Kota Gorontalo sebagai kota yang aman, tentram, damai dan berbudaya yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa**



**Tabel 3.56**  
**Persentase Angka Kriminalitas Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian
			Kasus	Penyelesai	
1	2	3	5	6	
1	Angka Kriminalitas	Persen	613	569	92.82% (Sangat Baik)

Sumber : Polresta Kota Gorontalo Tahun 2021

Stabilitas keamanan dan ketertiban umum menjadi alasan penting guna mendukung terwujudnya rasa aman, tenang dan damai dalam masyarakat di Kota Gorontalo. Salah satu tolak ukur ketertiban dan ketentraman yang dirasakan oleh masyarakat adalah minimnya kasus kriminalitas yang terjadi. Adapun trend kasus kriminalitas di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.57**  
**Daftar Kriminalitas Kota Gorontalo**

NO	URAIAN	Lapor Kasus	Penyelesaian
1	ANIAYA RINGAN DAN BIASA	174	126
2	PENCURIAN	122	181
3	ANIAYA ANAK	57	33
4	JAMINAN FIDUSIA	45	25
5	PENGGELAPAN	41	47
6	KDRT	39	24
7	PENGOROKAN	32	19
8	PENIPUAN	29	42
9	PENCURIAN SEPEDA MOTOR	28	43
10	PELANGGARAN UU INFORMASI ELEKTRONIK	11	5
11	PENCABULAN	8	4
12	PENCEMARAH NAMA BAIK	8	8
13	PENGANCAM	7	6
14	PEMALSUAN SURAT	6	7
15	PENYEROBOTAN TANAH	6	3
<b>JUMLAH</b>		<b>613</b>	<b>569</b>
<b>PERSENTASI PENYELESAIAN KASUS</b>		<b>92%</b>	

Sumber : Polresta Kota Gorontalo Tahun 2021



Berdasarkan tabel diatas Jika dilihat dari tingkat penanganan kasus kriminalitas, Kota Gorontalo sudah melakukan upaya terbaik dalam menindaklanjuti laporan-laporan kasus kriminal yang masuk bahwa penanganan kasus kriminalitas di Kota Gorontalo yang mencapai **92%** kategori **Sangat Baik** dari Total kasus 613. Adapun kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh Aniaya ringan/biasa sebanyak 174 kasus, Pencurian sebanyak 122 kemudian Aniaya anak sebesar 57 kasus serta diikuti oleh kasus kriminalitas pada umumnya.



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak terlepas dari upaya – upaya strategis yang telah dilaksanakan di Kota Gorontalo antara lain:

- a. patroli wilayah bersama dengan unsur TNI, Polri bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo dengan titik sasaran daerah-daerah rawan keamanan dan ketertiban umum.
- b. meningkatkan peran aktif masyarakat melalui optimalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kelurahan;
- c. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. melaksanakan Rakor Tibumtranmas setiap tri wulan atau semesteran.

Kendala/atau permasalahan yang mempengaruhi Angka Kriminalitas di Kota Gorontalo adalah :





- a. minimnya peran serta masyarakat umum dalam pencegahan tindak kriminal;
- b. jumlah lapangan pekerjaan yang belum merata bagi masyarakat antara pria dan wanita sehingga berdampak pada kesenjangan sosial atau kemiskinan yang masih nampak;
- c. belum terbangunnya sinergitas antara aparat keamanan lainnya seperti dengan Kepolisian, TNI, Unsur Kecamatan, Aparat Pemerintahan kelurahan

Tujuan daerah **Terwujudnya Kota Gorontalo sebagai kota yang aman, tentram, damai dan berbudaya yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa** dengan indikator kinerja **Angka Kriminalitas** ditunjang oleh 2 sasaran strategis pembangunan Kota Gorontalo sebagai berikut :

**a. Sasaran Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur dengan 3 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.58**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2021**

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJDM 2020	Target Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6
1	Rasio Polisi Pamong Praja	/10000 penduduk	0	6.16	0	0.00%
2	Rasio Petugas Linmas yang Diberdayakan	/389 RT	64	25	25	100.00%
3	Persentase pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	30	71	71	100,00%
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>						<b>100,00%</b>



Berdasarkan tabel 3.48, Capaian kinerja meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di peroleh nilai rata-rata sebesar **100.00%**. Adapun realisasi sasaran **“Rasio Polisi Pamong Praja”** pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya tidak tercapai sebagaimana yang di targetkan hal disebabkan karena belum tersedianya formasi jabatan kebutuhan Rasio Polisi Pamong yang telah diformal oleh satuan terkait

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok menegakkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh jumlah personil yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memperhatikan :

- ❖ Jumlah Penduduk
- ❖ Luas Wilayah
- ❖ Jumlah APBD
- ❖ Rasio Belaja Aparatur
- ❖ Klasifikasi Besaran organisasi Perangkat daerah
- ❖ Jumlah Peraturan Daerah
- ❖ Jumlah Peraturan Kepala Daerah
- ❖ Kondisi Geografis aspek karakteristik daerah
- ❖ Tingkat potensi konflik social kemasyarakatan

Dari beberapa aspek diatas ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gorontalo yang berstatus ASN sejumlah 251 orang yang akan direalisasikan selama 10 Tahun dengan jumlah penambahan 25 Personil Pertahun sehingga diharapkan memenuhi apa yang sudah tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya kondisi yang ada saat ini hanya didukung oleh ASN sejumlah 74 Orang hal ini belum bersesuaian dengan amanat permendagri No. 60 tahun 2012 tentang pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong praja.

Sementara untuk indikator **“Rasio petugas Linmas yang diberdayakan”** di peroleh capaian sebesar mencapai **100.00 %** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban



masayarakat dan kegiatan social kemasyarakatan sehingga keberadaannya merupakan salah satu urusan wajib sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014. Pada tahun 2020 rekrutmen SATLINMAS ditargetkan sebanyak 50 orang namun yang dapat diberdayakan hanya sebanyak 25 orang yang tersebar di 25 RT dan masih terbatas dilima kelurahan yang berada diantara 9 Kecamatan atau 12,85% dari 389 yang ditargetkan, dan hanya dapat merealisasikan 6,4% atau sebesar 25 orang yang diberdayakan. Penyebab menurunnya kinerja atas indikator ini antara lain :

- A. Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- B. Pemerintah kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan dan belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan linmas
- C. Personil linmas banyak sudah lanjut usia dan tidak ada regenerasi

Sebagai upaya tindak lanjut tahun berikutnya adalah :

1. Pemerintah Kota Gorontalo melalui Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
2. Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT lurah dan Kepala RW
3. Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala lurah, tokoh masyarakat dan LSM
4. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pelatihan terhadap anggota linmas
5. Meningkatkan pengendalian dan pengorganisasian terhadap pengerahan anggota linmas

Selanjutnya untuk indikator **“Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik”** diukur melalui indikator Presentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang ditindak Lanjuti dengan realisasi capaian sebesar **100%** dengan kategori **“Sangat Baik”**, dimana Pada tahun 2020 Satpol PP menargetkan penyelesaian Perda sebesar 70 pelanggaran dengan realisasi 70. Hal ini bisa dilihat dari Rumus dibawah :



$$\frac{70 \text{ (Pelanggaran yang tertangani dengan baik)}}{70 \text{ (Pelanggaran yang ditargetkan)}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas tergambarakan prosentase hasil Penyelesaian Pelanggaran yang tertangani dengan baik sebesar 100 %.

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka **Sasaran Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** di peroleh rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir tahun RPJMD, yakni **17,61%**.

**b. Sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya**

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya diukur dengan 1 indikator dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.59**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya dan keagamaan yang di fasilitasi pemerintah	Ivent	4	2	4	200%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>200%</b>

Sumber : Dinas Parawista, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya

dengan realisasi capaian 200%. Penyelenggaraan ivent seni budaya dan keagamaan dilaksanakan pada triwulan I pelaksanaan anggaran atau sebelum adanya penyebaran wabah covid 19. Dari target yang telah



ditetapkan, maka sembilan kecamatan yang ada di Kota Gorontalo hanya dapat melaksanakan beberapa event

kegiatan penyelenggaraan seni budaya dan keagamaan diantaranya :

- 1) Penyelenggaraan Kegiatan pelestarian adat budaya daerah
  - Festival *meraji*
  - Festival Otanaha
  - Indo Smart City
  - Pentas Seni

#### ❖ Faktor yang Mempengaruhi Capaian

Faktor yang mempengaruhi sedikitnya kegiatan Ivent adalah karena adanya Penyebaran Wabah Covid 19 dan Instruksi dari Pemerintah Pusat untuk tidak mengadakan kegiatan yang dapat mengumpulkan massa demi mencegah penularan Covid 19 serta Refocusing Anggaran Program kegiatan diseluruh OPD untuk penanganan Wabah Covid 19.

#### ❖ Solusi

Pemerintah Kota Gorontalo telah berupaya melakukan berbagai program dan kegiatan yang menunjang akan kegiatan ini diantaranya pelonggaran mobilitas kegiatan masyarakat dimasa pandemic covid serta dibukanya kembali tempat-tempat wisata dan tempat umum lainnya agar kegiatan seni budaya dan adat istiadat dapat segera terlaksana

**Tabel 3.60**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah**  
**Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya**  
**Tahun 2021 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	2021	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah penyelenggaraan event seni budaya dan keagamaan yang di fasilitasi pemerintah	ivent	6	4	66.66%
<b>Rata-rata Terhadap RPJMD</b>					66.66%



Berdasarkan tabel 3.48, Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya di peroleh nilai rata-rata sebesar **100%** atau kategori “**Sangat Baik**”, Realisasi kinerja pada indikator “**Jumlah penyelenggaraan event seni budaya dan keagamaan yang di fasilitasi pemerintah**” pada tahun 2021 di targetkan sebanyak 2 (dua) ivent dengan realisasi capaian sebanyak 4 (empat) ivent. Sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2021 diperoleh sebesar **100%** kategori “**Sangat Baik**”. Realisasi capaian tersebut mengalami sedikit kenaikan di dibandingkan dengan tahun 2020, dimana realisasi ivent seni budaya dan keagamaan sebanyak 1 ivent.

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka diperoleh dengan rata-rata persentase capaian kinerja terhadap target akhir tahun RPJMD, yakni **66,66%**.

*Misi VI : Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini*

## 📍 Tujuan 6

**Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah**

**Tabel 3.61**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		5	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,02	3%	2,81%	93,66%

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses

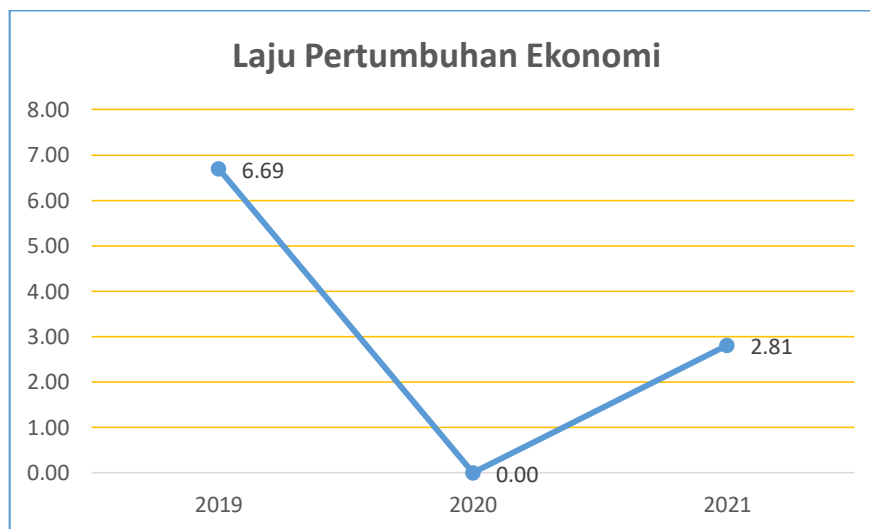


kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB secara umum di Kota Gorontalo Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,81% dari tahun sebelumnya yang turun hingga -0,02. Namun kenaikan ini merupakan rata-rata akumulatif dari semua sektor lapangan usaha karena terdapat ada beberapa sektor yang mengalami penurunan seperti sektor Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib turun sebesar -0,01 dari tahun sebelumnya, Sektor Listrik dan Gas mengalami penurunan sebesar 8,95%, sektor komunikasi dan informasi mengalami penurunan sebesar 3,9% serta sektor Jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan 5,31%. Meskipun disituasi pandemic Covid-19, salah satu sector yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial naik sebesar 3,15% menjadi 5,01% serta sektor penyediaan Akomodasi makan dan minum naik sebesar 7% dari -3,46% menjadi 4,45% ditahun 2021.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Gorontalo :

**Grafik 3.9**



Sumber : BPS, Kota Gorontalo 2021

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kota Gorontalo tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang besar yaitu pada tahun



2020 turun sebesar 6,49% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi -0,2%. Hal ini dipengaruhi oleh akselerasi sektor potensial daerah, terutama pada sektor sektor Konstruksi dan sektor perdagangan. Disisi lain aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah ikut terdampak oleh wabah pandemic Covid-19. Namun pada Tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Gorontalo naik dari -0,2 menjadi 2,81% Hal dipengaruhi dengan adanya langkah-langkah dari Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani penyebaran wabah pandemic covid-19 serta cakupan vaksinasi pada masyarakat mencapai 90,00% sehingga Pemerintah Kota Gorontalo mulai melakukan pelonggaran mobilitas masyarakat dari PPKM disejumlah tempat terutama pada sektor perdagangan serta aktivitas UKMN, hal ini bertujuan agar perekonomian di Kota Gorontalo bisa kembali pulih dan naik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Disisi lain pencapaian tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di tahun perencanaan Pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan kegiatan melalui kemudahan investasi dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha
2. Modernisasi pelayanan perizinan melalui penerapan sistem informasi manajemen perijinan
3. menciptakan wirausaha baru yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
4. Membangun konektivitas melalui kerjasama kemitraan dengan pelaku-pelaku pariwisata nasional
5. Peningkatan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan sistem jaringan kepariwisataan nasional

Tujuan daerah ***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah*** dengan indikator kinerja ***Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*** ditunjang dengan 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut :

**a. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi**

Capaian sasaran meningkatnya meningkatnya nilai investasi daerah diukur dengan indikator sebagai berikut:





**Tabel 3.62**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi**  
**Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Investasi	Rp	311,218,539,672	352,500,000,000	Rp 45.910.106.164	13,02%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>13,02%</b>

Berdasarkan table diatas Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Nilai Investasi** di peroleh nilai rata-rata sebesar **13.02%** atau kategori **“Tidak Baik”**. Indikator Nilai Investasi Daerah Kota Gorontalo dapat diketahui dari Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA). Dari hasil olah data dapat dilihat bahwa terdapat penurunan kinerja pada indikator **“Nilai investasi”** di Kota Gorontalo. Realisasi nilai investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 45.910.106.164 nilai tersebut masih jauh dari target yang ditentukan sebesar Rp 352.500.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 311.218.539.672 ada selisih capaian kinerja sebesar Rp 265.308.433.508

**Tabel 3.63**  
**Nilai Investasi Berdasarkan Bidang/Sektor Usaha PMDN Tahun 2021**

NO	BIDANG / SEKTOR USAHA	NILAI INVESTASI (RP)	TENAGA KERJA	JUMLAH PROYEK / UNIT USAHA	KET
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
	Industri kertas dan percetakan	1,285,000,000	14	6	
<b>II</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
	Konstruksi	5,148,300,000	54	10	
	Perdagangan dan reparasi	5,164,252,137	307	171	
	Hotel dan restoran	8,267,536,359	28	23	
	Transportasi gudang dan komunikasi	1,347,887,105	28	22	



NO	BIDANG / SEKTOR USAHA	NILAI INVESTASI (RP)	TENAGA KERJA	JUMLAH PROYEK / UNIT USAHA	KET
	Perumahan kawasan industry dan perkantoran	102.000.000	0	3	
	Jasa Lainnya	211.600.000	22	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>21,526,575,601</b>	<b>413</b>	<b>257</b>	

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisa bahwa Perusahaan yang melakukan investasi di Kota Gorontalo tahun 2021 sebanyak 257 unit. Perusahaan yang paling besar berkontribusi meningkatkan nilai investasi di Kota Gorontalo adalah di sektor perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran serta Transportasi gudang dan komunikasi. Pada tahun 2021 sektor perdagangan dan reparasi pertumbuhan memiliki usaha sebanyak 23 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 8,267,536,359, kemudian disusui sektor Perdagangan dan reparasi memiliki sebanyak 171 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 5,164,252,137, kemudian konstruksi Rp. 5,148,300,000, dan Transportasi gudang dan komunikasi sebanyak 22 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,347,887,105.

Menurunnya nilai investasi Kota Gorontalo pada tahun 2021 antara lain diakibatkan oleh pandemic covid-19 semenjak awal tahun 2020, ada kebijakan pemerintah melakukan pembatasan sosial menyebabkan beberapa sector menurun nilai investasinya, pada sektor perhotelan jumlah hunian berkurang yang diakibatkan kunjungan wisatawan asing kedalam negeri berkurang, restoran yang biasanya membuka usahanya secara normal dibatasi, pada sector industry kertas dan percetakan terjadi penurunan akibat adanya kebijakan pemerintah meliburkan sekolah dan institusi-institusi terdampak pandemi. Faktor lain yang menyebabkan nilai investasi daerah berkurang adalah Keterbatasan ketersediaan lahan peruntukan investasi dengan lokasi yang strategis khususnya industri, perdagangan dan jasa serta properti.

Untuk realisasi kinerja terhadap nilai investasi PMA Kota Gorontalo pada tahun 2021 Menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

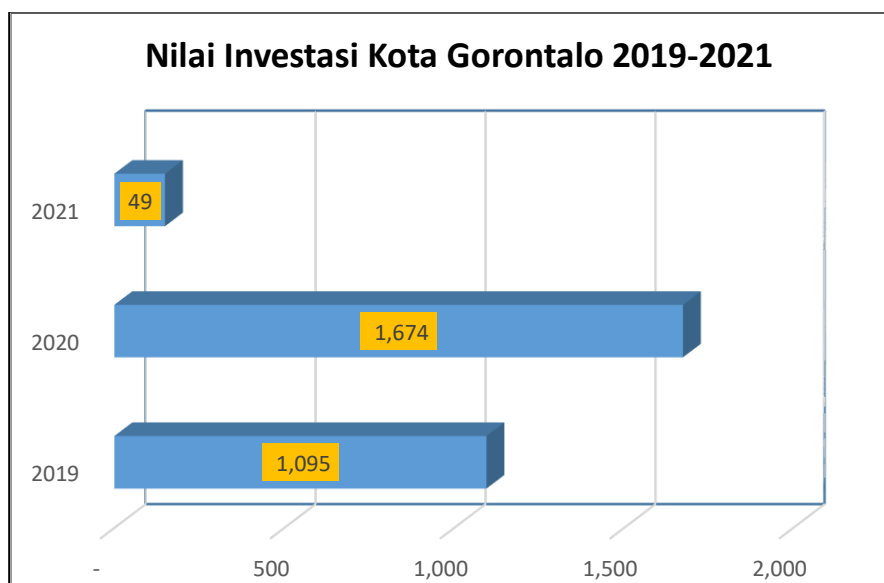
**Tabel 3.64**  
**Nilai Investasi Berdasarkan Bidang/Sektor Usaha PMA Tahun 2021**

NO	BIDANG / SEKTOR USAHA	NILAI INVESTASI (Rp. MILYAR)	JUMLAH PROYEK / UNIT USAHA	KET
<b>I</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>			
	Hotel dan restoran	124.099.994	4	
	Transportasi Gudang dan Komunikasi	17.471.819.804	9	
	Perumahan kawasan industry dan perkantoran	6.776.687.014	9	
	Jasa Lainnya	10.923.750	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.383.530.563</b>	<b>24</b>	

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisa bahwa Perusahaan yang melakukan investasi di Kota Gorontalo tahun 2021 sebanyak 24 unit. Perusahaan yang paling besar berkontribusi meningkatkan nilai investasi di Kota Gorontalo adalah di sektor perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran serta Transportasi gudang dan komunikasi Rp. 17.471.819.804, kemudian sektor Perumahan kawasan industry dan perkantoran Rp. 6.776.687.014, sektor hotel dan restoran Rp. 124.099.994 kemudian sektor jasa lainnya Rp. 10.923.750 dengan total investasi Rp. 24.383.530.563

**Grafik 3.10**



Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun 2021 (Diolah)



Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, maka di peroleh persentase capaian dengan rata-rata sebesar 22,73%, terhadap target akhir tahun RPJMD.

Sebagai upaya pemerintah Kota Gorontalo meningkatkan daya tarik investasi kedepan antara lain :

1. Meningkatkan keikutsertaan dalam berbagai event promosi investasi skala nasional maupun melalui media teknologi informasi;
2. Mendorong ketersediaan lahan peruntukan investasi (industri, perdagangan, jasa dan properti) dengan luasan yang memadai pada lokasi yang strategis, didukung dengan ketersediaan infrastruktur penunjang dan aksesibilitas yang semakin baik;
3. Meningkatkan kemudahan, kecepatan dan kepastian proses perizinan usaha;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparat yang bertugas memfasilitasi penanaman modal, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;

#### **4. REALISASI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN**

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, belanja daerah ditargetkan sebesar **Rp. 35.960.730.638,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 29.793.515.022,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar **22.856.485.665,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.929.157.919,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 13.104.244.973,00** dengan realisasi sebesar **Rp 8.864.357.103,00** sehingga ada penghematan sebesar **Rp. 6,167,215,616,00**



**Tabel 3.65**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran Setelah Perubahan		
		Anggaran	Realisasi	% Kontribusi
1	Belanja Tidak Langsung	22.856.485.665,00	20.929.157.919,00	91,57%
2	Belanja Langsung	13.104.244.973,00	8.864.357.103,00	67,64%
<b>Jumlah</b>		<b>35.960.730.638</b>	<b>29.793.515.022</b>	<b>82,85%</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Kota Gorontalo 2021

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 91,57 % dari realisasi belanja Kota Gorontalo di tahun 2021 dan sisanya sebesar 67,64 % disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Gorontalo yang diperjanjikan pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp 533,757,290,389** Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 adalah sebesar **Rp 307,194,760,094** atau **81,59%**, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.66**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Gorontalo**  
**Per Sasaran Strategis Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	<b>Rp. 73,123,883,021</b>	<b>Rp. 65,345,085,769</b>	<b>89.40%</b>
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	<b>Rp. 149,717,903,378</b>	<b>Rp. 91,586,935,719</b>	<b>61.17%</b>
3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	<b>Rp. 3,724,128,986</b>	<b>Rp. 3,680,392,361</b>	<b>98,83%</b>
4	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan	<b>Rp. 16,226,868,370</b>	<b>Rp. 15,035,776,499</b>	<b>28.51%</b>



NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	Rp. 16,221,538,498	Rp. 12,774,448,636	92.66%
6	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Rp. 11,009,504,328	Rp. 8,421,030,828	76.49%
7	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Rp. 907,920,347	Rp. 1,339,061,700	86.58%
8	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan koperasi dan usaha mikro	Rp. 2,020,953,707	Rp. 1,914,242,613	94.22%
9	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	Rp. 3,323,753,406	Rp. 3,215,910,740	96.76%
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan	Rp. 17,634,942,448	Rp. 16,875,733,130	95.69%
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Rp. 33,329,299,075	Rp. 30,753,564,611	92.27%
12	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan Masyarakat	Rp. 7,654,511,129	Rp. 6,392,767,101	83.52%
13	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya	Rp. 2,934,230,274	Rp. 2,572,481,476	87.67%
14	Meningkatnya nilai investasi	Rp. 4,292,262,359	Rp. 2,751,152,746	64.10%
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 533,757,290,389</b>	<b>Rp. 307,194,760,094</b>	<b>81.59%</b>

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo Tahun 2021 (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2021.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas



sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.67**  
**Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021**  
**Per 31 Desember 2021**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>277,706,335,863.00</b>	<b>93,190,894,826.40</b>	<b>33.56</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54,921,744,968.00	54,921,744,968.40	<b>100.00</b>
	Penerimaan Pinjaman Daerah	222,784,590,895.00	38,269,149,858.00	<b>17.18</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>9,490,446,517.00</b>	<b>6,000,000,000.00</b>	<b>63.22</b>
	Penyertaan Modal Daerah	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	<b>100.00</b>
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3,490,446,517.00	-	<b>0.00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>268,215,889,346.00</b>	<b>87,190,894,826.40</b>	<b>32.51</b>

Sumber Data : Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2020

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Gorontalo, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 3.68**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran**  
**Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2021**

VISI : KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK						
NO	Tujuan & Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%	
1	2	3	4	4	5	
<b>Misi I</b>	<b>:</b>	<b>Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas</b>				
1	:	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya</b>	1	77.41%	Rp. 161,098,750,059	81.13%
	S1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	2	101.05%	Rp. 65,345,085,769	89.40%
	S2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.	1	100.81%	Rp. 108,935,835,008	61.71%
	S3	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	1	70.67%	Rp. 3,680,392,361	98.83%
<b>Misi II</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector public</b>				
1	:	<b>Meningkatnya fungsi layanan Kawasan Perkotaan dan Kualitas lingkungan Hidup Perkotaan</b>	2	84.48%	Rp. 74,985,527,138	60.58%
	S1	Meningkatnya Kualitas infrastruktur pada kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan pelayanan ekonomi, kawasan pelayanan sosial dan kawasan permukiman	1	107.85%	Rp. 59,949,750,639	28.51%
	S2	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	1	-	Rp. 15,035,776,499	92.66%
<b>Misi III</b>	<b>:</b>	<b>Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian</b>				
1	:	<b>Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran</b>	2	88.38%	Rp. 11,121,354,569	85.93%
	S1	Meningkatnya daya beli masyarakat;	1	13.02%	Rp. 8,421,030,828	76.46%
	S2	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja;	1	99.94%	Rp. 786,081,128	86.58%
	S3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	2	88.34%	Rp. 1,914,242,613	97.72%
<b>Misi IV</b>	<b>:</b>	<b>Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber Daya aparatur</b>				





VISI : KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK						
NO	Tujuan & Sasaran Strategis		Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
1	2		3	4	4	5
1	:	Terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, bersih, dan	2	62.95%	Rp. 50,845,208,481	94.91%
	S1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	1	103.15%	Rp. 3,215,910,740	96.76%
	S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan	3	72.78%	Rp. 16,875,733,130	95.69%
	S3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan	3	93.33%	Rp. 30,753,564,611	92.27%
<b>Misi V</b>	:	<b>Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya</b>				
1	:	Terwujudnya Kota Gorontalo sebagai kota yang aman, tentram, damai dan berbudaya yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa	1	92%	Rp. 8,965,248,577	85.59%
	S1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3	100%	Rp. 6,392,767,101	83.52%
	S2	Meningkatnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya	1	100%	Rp 2,572,481,476	87.67%
<b>Misi VI</b>	:	<b>Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini</b>				
1	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	1	93.67%	Rp. 2,751,152,746	64.10%
	S1	Meningkatnya Nilai Investasi	1	88.92	Rp. 2,751,152,746	64.10%

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Gorontalo Tahun 2021 (diolah)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2021 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Gorontalo.

## 5. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah



menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kota Gorontalo lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.69**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**  
**Per 31 Desember 2021**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>Pendapatan</b>	866,516,364,850.00	821,656,684,896.57	94.82
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,620,855,850.00</b>	<b>83,272,693,074.57</b>	<b>82.76</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	79,066,000,000.00	66,039,219,496.00	83.52
	Hasil Retribusi Daerah	125,000,000.00	139,636,469.00	111.71
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,500,000,000.00	3,276,809,494.00	72.82
	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	16,929,855,850.00	13,817,027,615.57	81.61
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>734,675,109,000.00</b>	<b>711,267,441,822.00</b>	<b>96.81</b>
	Dana Perimbangan	638,194,221,000.00	620,505,318,195.00	97.23
	Dana Insentif Daerah (DID)	48,980,868,000.00	48,980,868,000.00	100.00
	Pendapatan Bagi Hasil	47,500,020,000.00	41,781,255,627.00	87.96
<b>3</b>	<b>Lain lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>31,220,400,000.00</b>	<b>27,116,550,000.00</b>	<b>86.86</b>
	Pendapatan Hibah	3,348,000,000.00	3,258,000,000.00	97.31
	Lain-lain Pendapatan	27,872,400,000.00	23,858,550,000.00	85.60

Sumber Data : Badan Keuangan Kota Gorontalo Tahun 2021

## 6. IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN TERKAIT DENGAN KONDISI PANDEMIC COVID-19

Atas kebijakan pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Gorontalo telah melaksanakan



pemangkasan anggaran, sehingga dalam pencapaian target kinerja telah dilakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan. memperhatikan kebijakan tersebut, maka pada tahun pelaksanaan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo melakukan serangkaian rapat koordinasi secara internal selama masa Work From Home (WFH), dan mengambil langkah-langkah strategi yang dilaksanakan di masa pandemic covid-19 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan alokasi anggaran yang masih tersedia, serta mendorong pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas secara efektif dan efisien;
2. Melaksanakan kegiatan pendampingan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan aplikasi digital serta tetap memperhatikan protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19;
3. Menyusun prioritas dan melaksanakan rencana kegiatan yang tidak memerlukan anggaran besar namun memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan pencapaian kinerja;
4. Melakukan review dan penyesuaian Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

#### **7. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021**

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2021 tersebut diraih beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.70**  
**DAFTAR PENGHARGAAN/PRESTASI PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**SELAMA TAHUN 2021**

No.	Uraian	Tingkat	Tahun Perolehan	Penyelenggara
1	Pelayanan Publik kategori Sangat Baik Nilai A tahun 2020	Nasional	01-04-21	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
2	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dengan Predikat Nilai "B"	Nasional	22-04-21	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
3	Pemenang Kategori IV Implementasi Penilaian Kinerja	Nasional	10-05-21	Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional XI, di Bandung
4	Capaian Opini WTP Minimal 5x Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 s/d 2020	Nasional	24-05-21	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo
5	Posko Kelurahan dan Satgas Kecamatan (huangobotu, dungingi) terbaik Keberhasilan Pelaksanaan PPKM Mikro	Nasional	08-07-21	Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta
6	Masuk 20 Besar Kabupaten/Kota terbaik capaian vaksinasi dosis pertama tertinggi	Nasional	08-07-21	Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta
7	Apresiasi Capaian pembayaran Insentif Nakes Mencapai 54,54 persen	Nasional	13-08-21	Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta
8	TPID Terbaik Tahun 2020 Kategori Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Sulawesi	Nasional	25-08-21	Menteri Koordinator Perekonomian RI, di Jakarta
9	Kepala Daerah Inovatif 2021 kategori Pendidikan	Nasional	04-11-21	MNC Portal, di Jakarta
10	Terbaik 1 kategori Elektrofikasi Transaksi Pemda Tahun 2021 dan Terbaik II kategori Pemanfaatan kanal Pembayaran menggunakan QRIS untuk Pajak dan Retribusi	Provinsi	24-11-21	Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo
11	Kepala Daerah Terbaik Pedagogika Award Tahun 2021	Provinsi	25-11-21	PGRI Provinsi Gorontalo
12	Tresury Award Tahun 2021 Terbaik Pertama Pemerintah Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Daerah Terbaik	Nasional	02-12-21	Kementerian Keuangan RI



13	Penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian Opini WTP	Nasional	02-12-21	Kemneterian Keuangan RI
14	BKN Award Peringkat III Nasional Atas Capaian dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian ASN Bagi Pemerintah Kota Tipe B	Nasional	08-12-21	Badan Kepegawaian Nasional RI
15	Piagam Penghargaan atas Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021	Provinsi	16-12-21	Pemerintah Provinsi Gorontalo
16	Piagam Penghargaan Atas Dukungan Pelaksanaan Program JKN-KIS Melalui Integrasi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Tahun 2021	Provinsi	16-12-21	BPJS Kesehatan, Provinsi Gorontalo
17	Peringkat II Nasional ajang Apresiasi Cerdas Berkarakter	Nasional	19-12-21	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Virtual)
18	Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter dalam acara Ajang Apresiasi Cerdas Berkarakter Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2021	Nasional	23-12-21	PLT. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

**Gambar 3.1**



Penghargaan atas Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021



Treasure Award Tahun 2021 Terbaik Pertama Pemerintah Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Daerah Terbaik





Piagam Penghargaan BKN Award 2021



Penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan capaian Opini WTP



Penghargaan Pencapaian Elektronifikasi Transaksi Tahun 2021





## BAB IV PENUTUP

---

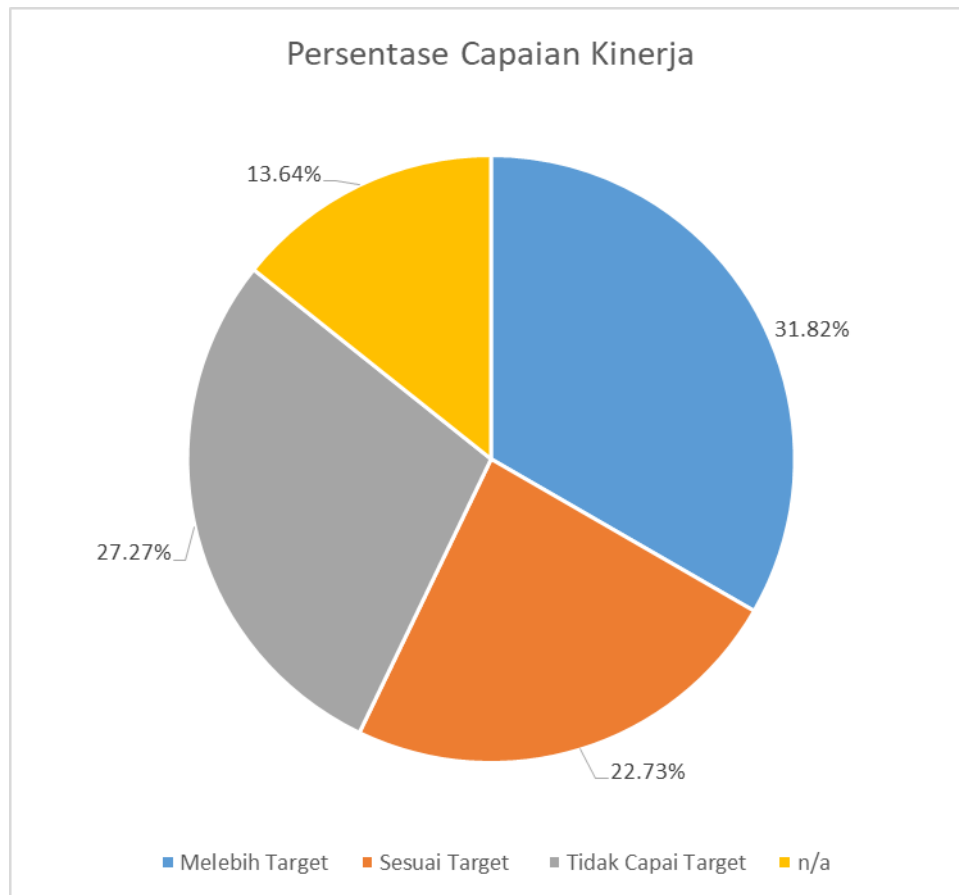
Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Gorontalo Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Gorontalo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Pencapaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2021 dari 14 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran yang diukur, terdapat **7 Indikator Melebihi Target**, yaitu (Angka Harapan Lama, Angka Harapan Hidup, IKLI, Persentase UKM yang meningkat omsetnya, Nilai SPIP, Ivent Seni Budaya) **5 Indikator Tercapai Sesuai Target** yaitu ( Angka Lama Sekolah, Inovasi Daerah, Opini Keuangan, Rasio Petugas Linmas, Persentase Pelanggaran tertangani dengan baik) **6 Indikator Tidak mencapai Target** yaitu ( PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita, Partisipasi Angkatan Kerja, Koperasi aktif dan sehat, Nilai LAKIP, Nilai Investasi) **3 Indikator Belum ada Penilaian** yaitu ( Skor Adipura, Nilai LPPD, Rasio Petugas Linmas)

Adapun Indikator Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 Secara keseluruhan dinyatakan “**Baik**”, karena capaian rata-ratanya sebesar **93,17%** dari target.

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel sebagai berikut:

**Grafik 3.1**

Persentase Capaian Kinerja Kota Gorontalo Tahun 2021


**Tabel 4.1**
**Kategori Penilaian Capaian Indikator**

No	Rata-Rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	$\geq 100$	Sangat Baik	7
2	$\geq 85$ s.d $< 100$	Baik	8
3	$\geq 65$ s.d $< 85$	Cukup Baik	2
4	$\geq 50$ s.d $< 65$	Kurang Baik	0
5	$< 50$	Tidak Baik	2
6	N/A (Belum ada Data)		3
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

Sumber Data : Bagian Organisasi Tahun 2021 (Di Olah)

Untuk permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya 2 (dua) indikator sasaran, akan menjadi fokus perbaikan kinerja ditahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan pimpinan Perangkat



Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Gorontalo Tahun 2021 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

**Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Gorontalo, Maret 2022

**WALI KOTA GORONTALO**



**H. MARTEN TAHA, SE.,M.Ec.Dev**